



KABUPATEN
BOGOR
ISTIMEWA & GEMILANG
KUTA UDAYA WANGSA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2025-2029



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BOGOR**



**BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 34 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan harus ditindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Penyusunan Jangka Menengah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 137);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor beserta nomenklatur perubahannya dalam hal terjadi perubahan kebijakan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintah bidang perencanaan Daerah.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah penanggung jawab urusan perencanaan Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

10. Rencana ...

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
11. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 3 (tiga) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala Daerah.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja PD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
17. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan Daerah, informasi keuangan Daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.
20. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
21. Informasi Pembangunan Daerah adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah, serta analisis dan Profil pembangunan Daerah.
22. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
23. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
24. Kebijakan Daerah adalah arah/tindakan yang diambil oleh Daerah untuk mencapai tujuan.
25. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
26. Prioritas Pembangunan Daerah adalah suatu tema atau agenda pembangunan tahunan Daerah yang telah ditetapkan dan merupakan benang merah/tonggak dalam mencapai sasaran tiga tahunan dalam RPD melalui Program pembangunan Daerah tahunan.

BAB II

KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Kedudukan Renstra PD adalah:

- a. Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2030;
- b. Renstra PD tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2025-2029; dan
- c. Renstra PD menjadi pedoman bagi PD dalam penyusunan Perubahan Renja PD tahun 2025 dan Renja PD tahun 2026-2030;

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Sistematika dokumen Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB III : TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V : PENUTUP

Pasal 4

Isi beserta uraian dokumen Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran LXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV ...

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

**Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan
Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Pasal 5

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis PD.
- (2) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala Badan atau sebutan lainnya.
- (3) Kepala Badan atau sebutan lainnya melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis PD.
- (4) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan dari Kepala Badan atau sebutan lainnya.
- (5) Kepala PD menyampaikan laporan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Badan sesuai periode pelaporan.

Bagian Kedua

**Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan dan Hasil
Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Pasal 6

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Kepala PD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Badan sesuai periode pelaporan.
- (3) Kepala Badan menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (4) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan pelaksanaan Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Badan.

BAB V ...

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 7

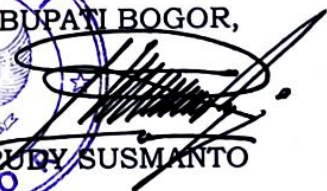
- (1) Renstra PD dapat diubah apabila terjadi perubahan pada RPJMD dan RKPD.
- (2) Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam perubahan Renstra PD.
- (3) Tahapan penyusunan Renstra PD berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra PD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 17 September 2025


BUPATI BOGOR,

RUDY SUSMANTO

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 17 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



AJAT ROCHMAT JAINIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2025 NOMOR 34

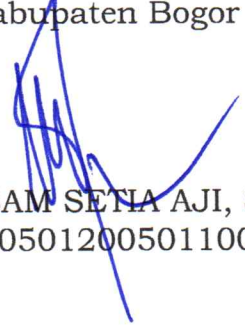
KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan Rahmat-Nya kegiatan penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 ini dapat tersusun dan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 .

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor dimaksudkan untuk memberikan arahan (*guide line*) bagi segenap pimpinan dan staf pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam penyusunan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bogor. Adapun tujuannya untuk meningkatkan kontribusi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor dalam penjaminan mutu perencanaan Pembangunan dan menjaga konsistensi dokumen perencanaan yang dihasilkan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, berkelanjutan dan terintegrasi.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Tim yang telah melaksanakan penyusunan dokumen ini serta seluruh unsur pimpinan yang telah memberikan dukungan, dengan harapan dokumen ini bermanfaat dan memiliki kontribusi nyata untuk pencapaian Kabupaten Bogor.

Cibinong, September 2025
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset, dan Inovasi
Daerah Kabupaten Bogor


Dr. BAMBAM SETIA AJI, S.T, MBA
NIP. 197305012005011009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I..... 1

PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 3

 1.3 Maksud dan Tujuan..... 7

 1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II 13

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH 13

2.1 Gambaran Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor..... 13

 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah 13

 2.1.2 Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan 21

 Inovasi Daerah Kabupaten Bogor 21

 2.1.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) 21

 2.1.2.2 Sumber Daya Umum Sarana Kerja Asset atau Modal 23

 2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor 25

 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan 55

BAB III..... 58

TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 58

 3.1 Tujuan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 59

 3.2 Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 60

 3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 61

 3.4 Strategi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 62

BAB IV 64

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN UNSUR PERENCANAAN SERTA RISET DAN INOVASI DAERAH..... 64

BAB V..... 102

PENUTUP 102

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020 sampai Tahun 2024 24

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 sampai Tahun 2024 28

Tabel 2. 3 Perumusan Permasalahan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor 57

Tabel 2. 4 Perumusan Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor 57

Tabel 3. 1 Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 61

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan 63

Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor 62

Tabel 4. 1 Tabel Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029..... 65

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 83

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah..... 84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bappedalitbang Kabupaten Bogor..... 14

Gambar 2. 2 Data Pegawai Bappedalitbang Kabupaten Bogor 21

Gambar 2. 3 Data Peta Jabatan kebutuhan Pegawai Bappedalitbang Kabupaten Bogor.....22

Gambar 2. 4 Data Aset Bappedalitbang Kabupaten Bogor 23

LAMPIRAN XXXIV PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 34 TAHUN 2025

TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2025

TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2025.

Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan tahapan:

- (1) Persiapan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029;
- (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD Tahun 2025-2029;
- (3) Penyesuaian Rancangan Awal Renstra PD Tahun 2025-2029 sesuai hasil konsultasi publik RPJMD;
- (4) Penyusunan Rancangan Renstra PD;
- (5) Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD;
- (6) Verifikasi Rancangan Renstra PD;
- (7) Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029;
- (8) Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terhadap Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025-2029;
- (9) Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD;
- (10) Penetapan Renstra PD Tahun 2025-2029.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Fungsi Penunjang dalam Bidang Perencanaan Pembangunan. Dalam penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periode Renstra perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra sendiri maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 meliputi (1) Persiapan Penyusunan (2) Penyusunan Rancangan Awal (3) Penyusunan Rancangan (4) Penyusunan Rancangan Akhir dan (5) Penetapan Renstra Perangkat Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor menerapkan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan daerah, antara lain:

1. Pendekatan Teknokratik, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan Partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui forum.
3. Pendekatan Holistik-Tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan / tau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

4. Pendekatan Integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
5. Pendekatan Spasial, dilaksanakan dengan memepertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemabran Negara Nomor 4483);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tambahan lembaran Negara Republik Inonesia 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang menjadi Undang-undang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pemabngunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 11. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 6042);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasii dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
32. Surat Edaran Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda terkait penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2025-2029;
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentan Rencana Pebangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembanran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);
39. Peraturan Bupati bogor Nomor 30 tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional Visi, Misi dan Program Bupati yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor selama kurun waktu 2025-2029. Maksud dari penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabuapten Bogor Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman bagi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 adalah:

1. Merumuskan Permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Bogor yang menjadi pertimbangan penentuan tujuan dan sasaran pembangunan;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor untuk 3 (tiga) tahun kedepan;
3. Pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2025;
4. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencan Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026;
5. Bahan penyempurnaan Rencana Teknokratik RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029; dan
6. Instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 memuat 8 (delapan) bab, Sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah;

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi, dan dengan Renja Perangkat Daerah. Disamping itu, menjelaskan pula terkait alasan perubahan Renstra akibat Kebijakan Nasional.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Rensta Perangkat Daerah. Maksud adalah tujuan global yang ingin dicapai, sedangkan tujuan adalah poin-poin rinci yang ingin dicapai dari perubahan Renstra ini.

1.4 Sistematika

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen berdasarkan bab per bab.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BOGOR

2.1 Gambaran Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi seluruh unsur struktural dan fungsional Perangkat Daerah sesuai Peraturan Bupati terkait SOTK PD.

2.1.2 Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang memiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan :

Menguraikan pencapaian IKU dan IKK PD sampai dengan Tahun 2024, rincian pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta menyebutkan mana yang tercapai, yang melampaui target dengan alasan, serta yang tidak tercapai dengan alasan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Menguraikan pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan kewenangan PD, apa saja yang dilayani berdasarkan kelompok sasaran.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan

Menguraikan permasalahan PD yang masih belum bisa diselesaikan hingga tahun 2024, berupa:

- a. Belum tercapainya target, dan penyebabnya;
- b. Permasalahan kekinian yang muncul;
- c. Permasalahan belum terlaksananya kewenangan;

- d. Permasalahan belum terlaksananya mandatoty kebijakan pusat dan provinsi jabar;
- e. Permasalahan yang terkait dengan hasil evaluasi KLHS;
- f. Permasalahan lainnya yang perlu diuraikan.

2.2.2 Isu Strategis

Menguraikan isu strategis yang berdampak pada pelaksanaan kewenangan PD yang berpengaruh pada kinerja PD. Isu strategis yang berdampak pada pelaksanaan kewenangan PD yang berpengaruh pada kinerja PD. Isu Strategis disajikan dalam lingkup isu Internasional, Regional, Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor, serta isu yang berasal dari masukan DPRD. Isu strategis juga disajikan dengan menganalisis potensi daerah yang akan menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan pelayanan PD.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

Tujuan diturunkan dari Sasaran daerah yang diampu oleh PD sesuai dengan kewenangan dan NSPK. Perangkat Daerah dengan >1 bidang urusan, hanya tetap memiliki 1 tujuan, dengan menghimpun kewenangan yang ada.

Tujuan merupakan kinerja yang ingin dicapai. Gunakan bahasa kinerja. Gunakan indikator yang sesuai dengan tujuan.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

Sasaran merupakan kinerja yang diturunkan dari tujuan PD, dengan memperhatikan apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Gunakan indikator yang sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

Menguraikan langkah konkrit pencapaian tujuan dan sasaran PD, yang sesuai dengan NSPK dan kewenangan PD, serta selaras dengan arah kebijakan dalam RPJMD.

3.4 Strategi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029

Strategis adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumberdaya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra.

Strategis dibuat dalam bentuk penahapan, dimana penahapan merupakan rincian prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Dalam sub bab ini diuraikan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran, dengan mempertimbangkan SDM, fokus dan pentahapan (waktu/tahun pelaksanaan), sehingga bisa terimplementasi dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan.

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

Menguraikan langkah konkrit pencapaian tujuan dan sasaran PD, yang sesuai dengan NSPK dan kewenangan PD, serta selaras dengan arah kebijakan dalam RPJMD.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN UNSUR PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

4.1 Program, kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Menguraikan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator, target kinerja serta kebutuhan anggaran tahun rencana (2025-2030). Program, kegiatan dan sub kegiatan yang digunakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam SIPD, serta digunakan berdasarkan cascading, mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output (kinerja).

4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Perangkat Daerah

IKU yang disajikan adalah IKU tujuan dan sasaran PD. IKK merupakan kinerja yang dibutuhkan untuk pencapaian kinerja bidang urusan (outcome program dan output kegiatan). IKK dapat mengakomodir kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian terkait.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan tindak lanjut substansi Rensta untuk pedoman penjabaran Renja mulai tahun 2025-2030. Bab penutup ditandatangani oleh Bupati Bogor.

Lembar ini dikoordinasikan oleh Bappedalitbang untuk penandatangannya.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

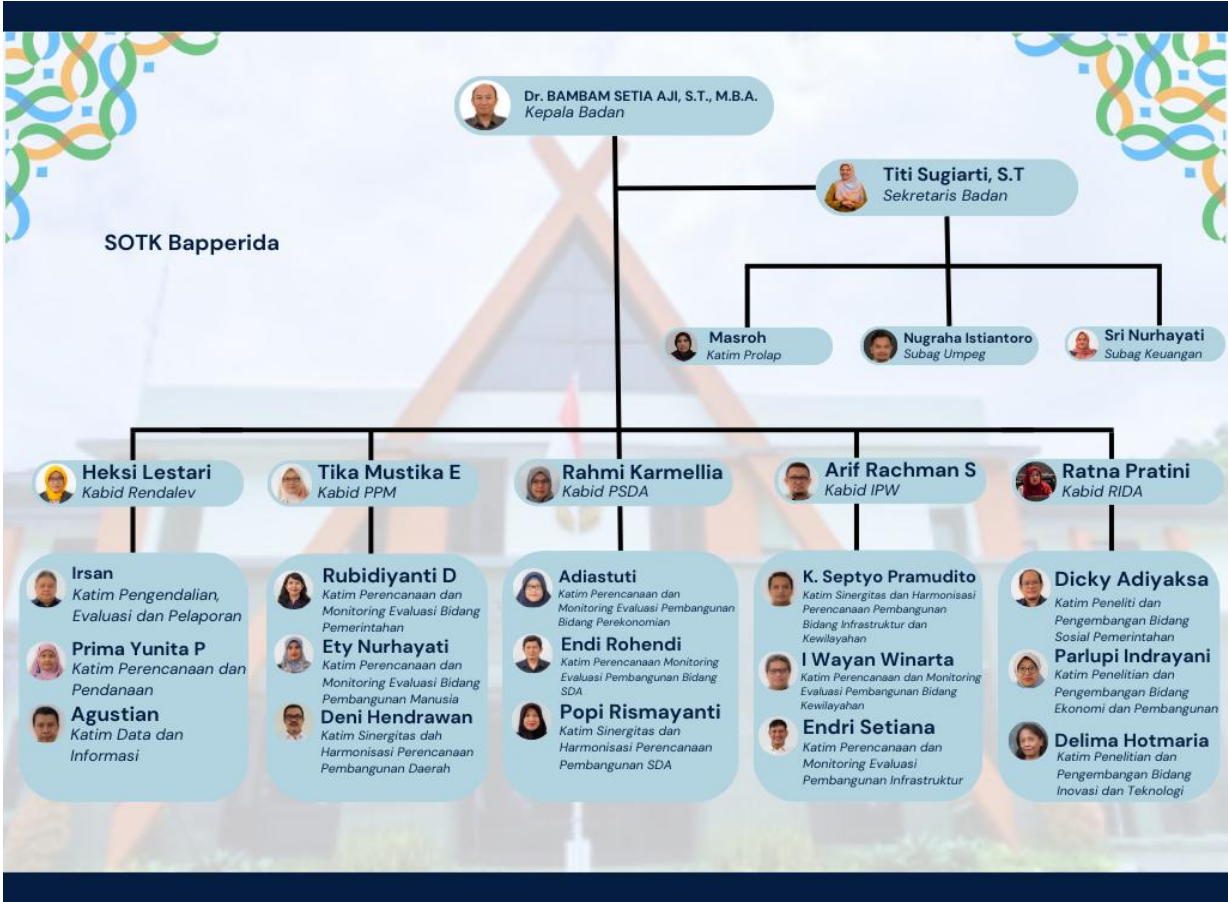
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok **“Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan”**. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah;
3. Pengendalian, Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah;
5. Pelaksanaan administrasi Badan;
6. Pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Adapun susunan organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bapperida Kabupaten Bogor



Sumber : Peraturan Bupati Bogor Nomor 30 Tahun 2024

1. KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoorinasikan pelaksanaan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunya tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Badan.

Sekretariat mempunya fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. pengoordinasian dan penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan;

- c. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan;
- d. pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
- e. penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
- f. pengelolaan keuangan dan asset Badan;
- g. pengelolaan hubungan Masyarakat;
- h. pelaksanaan dan pengkoordinasian penilaian reformasi birokrasi;
- i. pengelolaan sistem informasi Badan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan. Untuk menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Badan;
- c. Pengelolaan barang/jasa Badan;
- d. Penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
- e. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
- f. Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Badan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2.2 SUB BAGIAN KEUANGAN

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai Fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
- b. Penatausahaan pelaporan keuangan Badan;
- c. Penyusunan pelaporan keuangan Badan;
- d. Pengkoordinasian penyiapan bahan tanggapan atas laporan

- pemeriksaan keuangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang fungsinya.

3. BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Bidang perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD), dokumen rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) dan merumuskan bahan rencana pendanaan pembangunan non APBD;
 - b. Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi, dan swasta;
 - c. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah, serta pengendalian dan evaluasi pendanaan non APBD;
 - d. Penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian sistem data dan informasi pembangunan daerah;
 - e. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
4. BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, sinergitas dan

harmonisasi perencanaan pembangunan sektoral dan regional lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. Penyusunan bahan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- c. Pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- d. Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan Perangkat daerah, Provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- e. Pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- f. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

5. BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan sektoral dan regional lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan bahan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan rencana Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. Penyusunan bahan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. Pengelolaan daya dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

6. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian, pemantauan evaluasi dan pelaporan, sinergitas dan regional lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan bahan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan rencana Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - b. Penyusunan bahan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - c. Pengelolaan daya dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - d. Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - e. Pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - f. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
7. BIDANG RISET DAN INOVASI DAERAH
- Mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta Inovasi dan Inovasi di Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta

Invensi dan Inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;

- b. Penyusunan Perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah;
- e. Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah;
- f. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- g. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah;
- h. Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- i. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang riset dan Inovasi Daerah;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Riset Inovasi Daerah; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud terdiri atas sejumlah Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang masing-masing berada di bawah Sekretaris dan Kepala

Bidang. Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja.

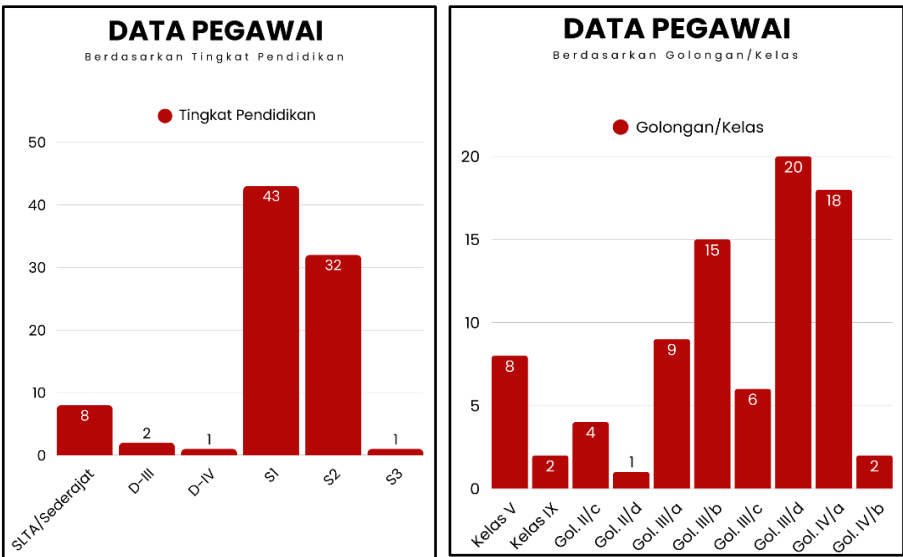
Dalam melaksanakan kegiatannya, tim kerja sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Ketua Tim. Penentuan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan pencapaian target kinerja organisasi. Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

2.1.2 Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor sebanyak 87 Orang Pegawai ASN dan PPPK, Pegawai Non ASN sebanyak 27 Orang, Petugas Keamanan sebanyak 11 Orang dan Petugas Kebersihan Sebanyak 18 Orang.

Gambar 2. 2 Data Pegawai Bapperida Kabupaten Bogor

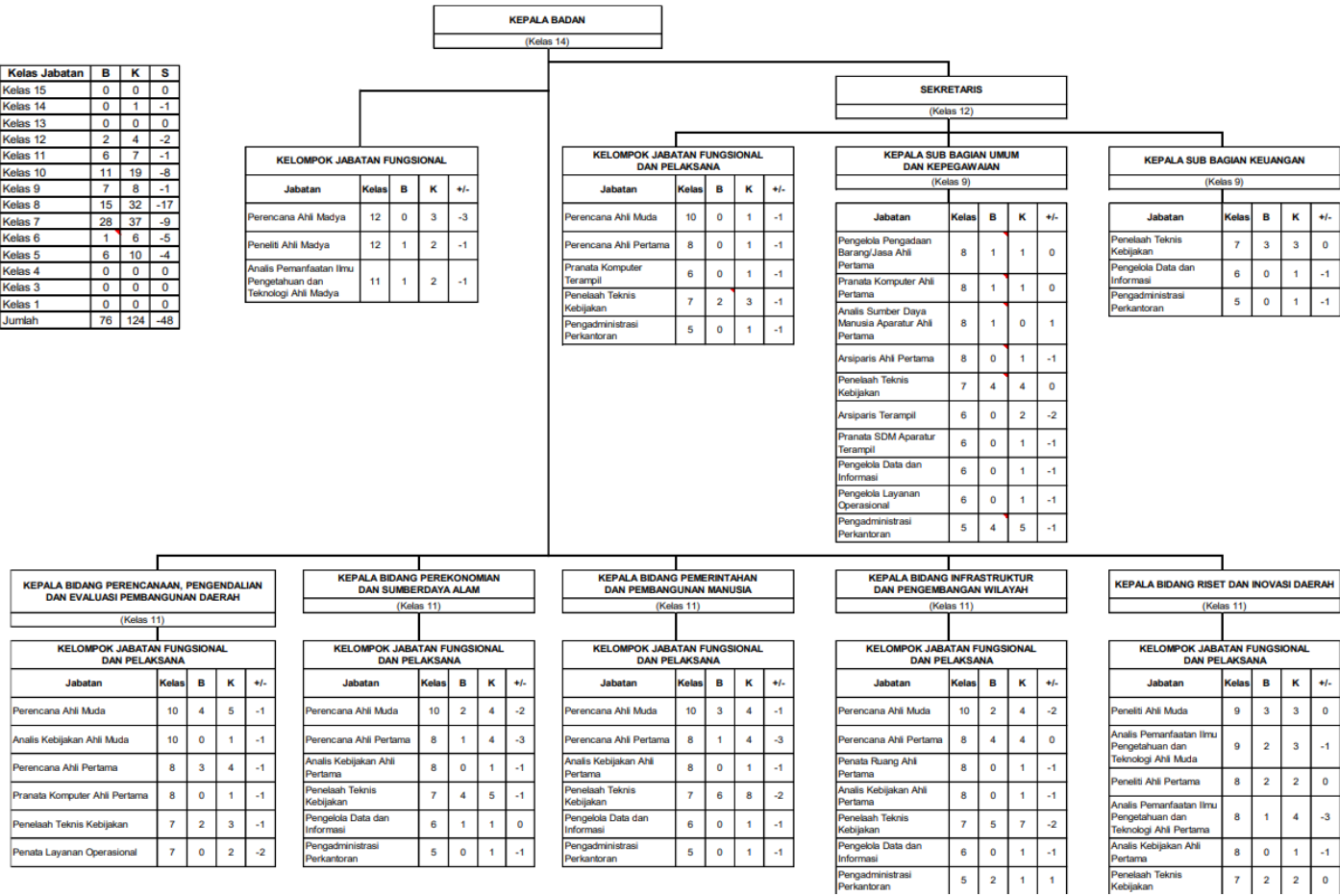


Sumber : Bapperida Kabupaten Bogor, 2025

Tabel 2.1
Daftar Pegawai Bappedalitbang Kabupaten Bogor

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	SEKRETARIAT	12	8	20
2	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	9	5	14
3	BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	4	9	13
4	BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	4	7	11
5	BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	10	6	16
6	BIDANG RISET DAN INOVASI	6	7	13
JUMLAH TOTAL		45	42	87

Gambar 2. 3 Data Peta Jabatan kebutuhan Pegawai Bapperida Kabupaten Bogor

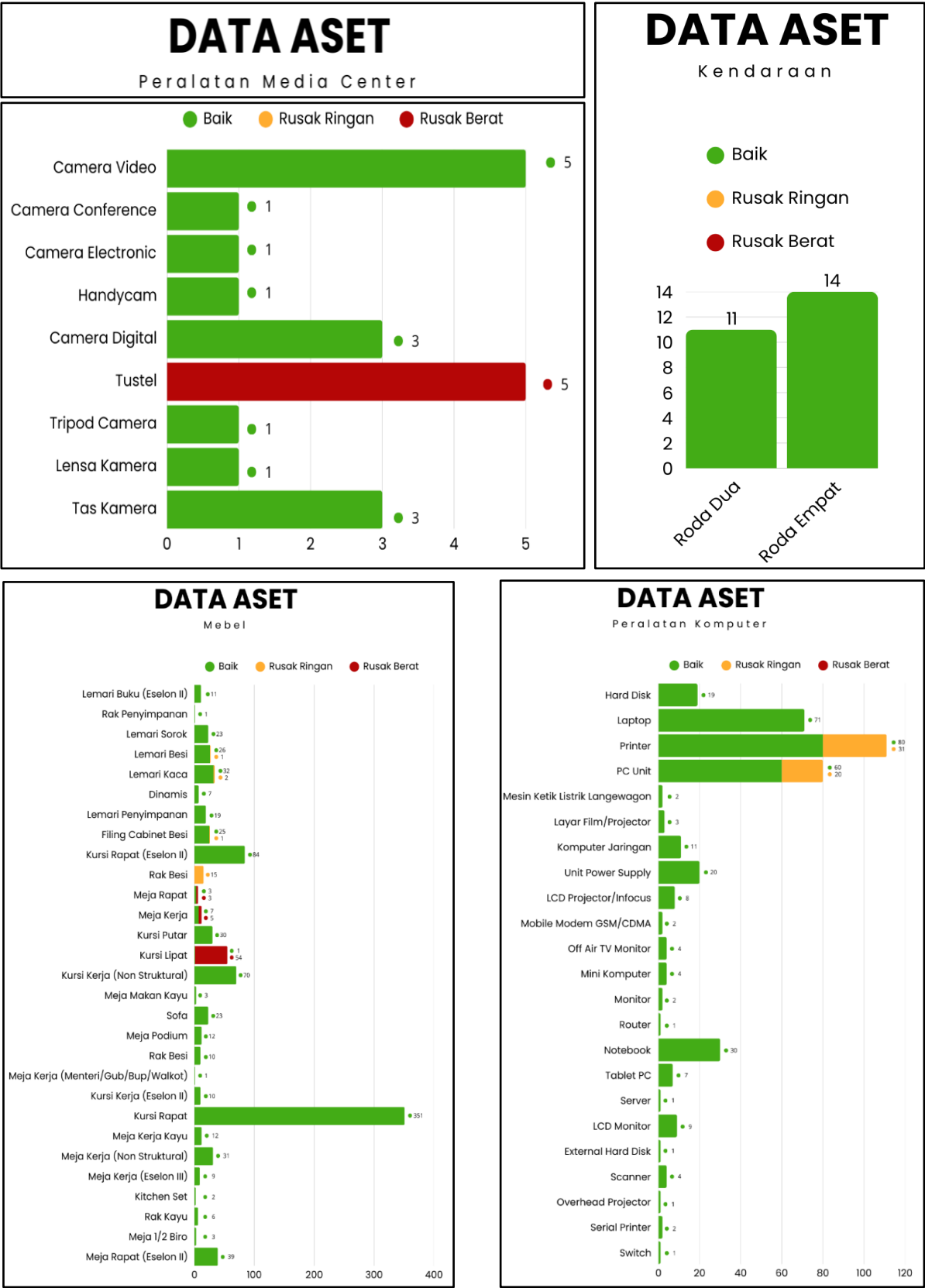


Sumber : Kepbup Nomor: 061/5/Kpts/Per-UU/2025

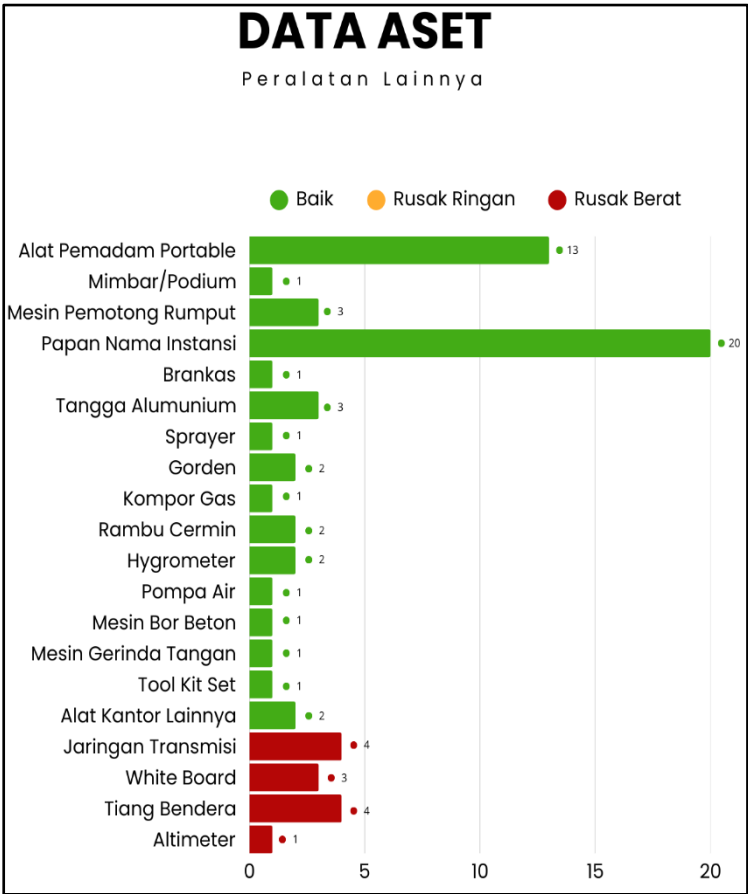
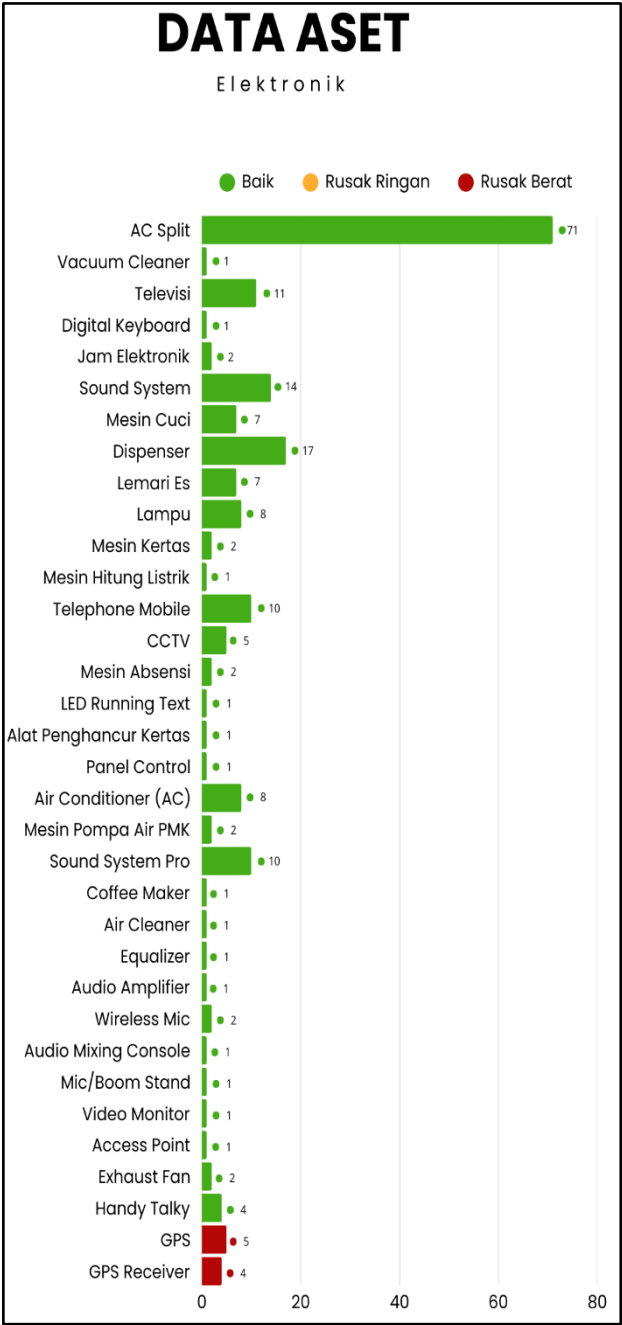
2.1.2.2 Sumber Daya Umum Sarana Kerja Asset atau Modal

Sarana Prasarana yang dimaksud meliputi sarana prasarana yang merupakan aset pemerintah Kabupaten Bogor sebagai peralatan kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor. Kondisi sarana prasarana sebagai alat kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabuapten Bogor dalam menjalankan tugas dan fungsingnya. Data kondisi umum sarana dan prasarana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor terdiri dari Tanah dengan luas 6.246 M² dengan rincian aset sebagai berikut:

Gambar 2. 4 Data Aset Bappedalitbang Kabupaten Bogor



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor



2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor

2.1.3.1 Menguraikan Pencapaian IKU PD

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor dari tahun 2020 sampai dengan triwulan IV tahun 2024, maka capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor dapat dilihat sebagaimana tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1
Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020 sampai Tahun 2024

NO	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15= 10/5 *100	16 = 11/6 *100	17 = 12/7 *100	18 = 13/8 * 100	19 = 14/9 *100
	Tujuan																	
	Tata kelola perencanaan pembangunan yang berkualitas serta penelitian dan pengembangan yang inovatif	Nilai sakip sebagai komponen Perencanaan	poin	23.85	N/A	-	-	-	23.58	-	-	-	-	99	-	-	-	-
	Sasaran																	
	Terwujudnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Penelitian dan Pengembangan yang inovatif	Prosentase Defusi Hasil Penelitian di Kabupaten Bogor	%	20	-	-	-	-	16	-	-		-	80	-	-	-	-
		Prosentase Inovasi di Kabupaten Bogor	%	20	-	-	-	-	20	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Tujuan																	

NO	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15= 10/5 *100	16 = 11/6 *100	17 = 12/7 *100	18 = 13/8 * 100	19 = 14/9 *100
	Terwujudnya tata kelola perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang berkualitas	Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Provinsi dan Nasional	%	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-
	Sasaran																	
	Terwujudnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	%	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-
	Penelitian dan Pengembangan yang inovatif	Persentase Rekomendasi hasil Penelitian dan Pengembangan dalam kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diakomodir	%	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-
		Jumlah Inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah dan masyarakat di Kabupaten Bogor	Inovasi	-	166	199	239	-	-	199	221	248	-	-	120	111	104	-
	Tujuan																	

NO	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15= 10/5 *100	16 = 11/6 *100	17 = 12/7 *100	18 = 13/8 * 100	19 = 14/9 *100
	Terwujudnya perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang berkualitas	Nilai SAKIP	Satuan	-	-	-	-	39.64	-	-	-	-	39.64	-	-	-	-	100
	Sasaran																	
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Efisien, Efektif dan berdampak Positif ke masyarakat	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Bogor	Poin	-	-	-	-	23.81	-	-	-	-	23.81	-	-	-	-	100
	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan daerah yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Bogor	Poin	-	-	-	-	15.83	-	-	-	-	15.83	-	-	-	-	100
	Hasil riset dan inovasi yang bermanfaat	Kebijakan hasil riset yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kebijakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15= 10/5 *100	16 = 11/6 *100	17 = 12/7 *100	18 = 13/8 * 100	19 = 14/9 *100
		Indeks Inovasi Daerah	Predika t	-	-	-	-	Sangat Inovatif	-	-	-	-	Sangat Inovatif	-	-	-	-	100
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kewenangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	-	-	-	-	84.52	-	-	-	-	84.52	-	-	-	-	100

Berdasarkan tabel 2.1 target Tujuan pada indikator pertama tahun 2024 yaitu Nilai SAKIP memperoleh capaian sebesar 100% dari target 39.64 Poin dengan capaian realisasi sebesar 39.64%. Nilai SAKIP tersebut di dapat dari nilai komponen perencanaan sebesar 23.81 Poin sedangkan nilai pada komponen Pengukuran di peroleh nilai sebesar 15.83 Poin.

Sedangkan target kinerja sasaran pada indikator Pertama Tahun 2024 yaitu Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Bogor memperoleh capaian sebesar 100% dari target yang di tetapkan sebesar 23.81 dengan tingkat capaian realisasi sebesar 23.81 poin.

Selanjutnya pada sasaran pada indikator ke Dua Tahun 2024 yaitu Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Bogor memperoleh capaian sebesar 100% dari target yang di tetapkan sebesar 15.83 Poin dengan tingkat capaian realisasi sebesar 15.83 poin

Sedangkan pada sasaran pada indikator Ketiga Tahun 2024 yaitu Kebijakan hasil Riset yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan target berupa Predikat Sangat Inovatif dengan tingkat Capaian realisasi yaitu predikat sangat Inovatif dengan kumulatif perolehan poin sebesar 88.21 poin.

2.1.3.2 Menguraikan Pencapaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD), juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor dari tahun 2020 sampai dengan triwulan IV tahun 2024, maka capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor dapat dilihat sebagaimana tabel 2.2 berikut;

Tabel 2. 2
Pencapaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 sampai Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 -2020-2024/5*100	18
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2,264,801,000	-	-	-	-	2,209,006,780	-	-	-	-	97.77	-	-	-	-		
Pengelolaan data dan informasi	292,755,000	-	-	-	-	281,938,000	-	-	-	-	96.31	-	-	-	-		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	630,294,000	-	-	-	-	624,499,500	-	-	-	-	99.08	-	-	-	-		
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	374,879,500	-	-	-	-	361,793,250	-	-	-	-	96.51	-	-	-	-		
Perencanaan Pembangunan Berbasis Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL)	129,455,500	-	-	-	-	127,305,500	-	-	-	-	98.34	-	-	-	-		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH LINGKUP BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	1,016,290,500	-	-	-	-	985,348,380	-	-	-	-	96.96	-	-	-	-		
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Lingkup Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan tenaga Kerja	670,623,000	-	-	-	-	661,123,150	-	-	-	-	98.58	-	-	-	-		
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Lingkup Sub Bidang Pemerintahan	73,552,500	-	-	-	-	73,436,500	-	-	-	-	99.84	-	-	-	-		
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Lingkup Sub Bidang Kesehatan dan Sosial	117,647,000	-	-	-	-	115,723,230	-	-	-	-	98.36	-	-	-	-		
Penanganan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	154,468,000	-	-	-	-	135,065,500	-	-	-	-	87.44	-	-	-	-		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH LINGKUP BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA DAYA ALAM	619,357,000	-	-	-	-	616,239,000	-	-	-	-	99.50	-	-	-	-		

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN 17 =2020- 2024/5*100	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Lingkup Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata	316,893,000	-	-	-	-	315,588,000	-	-	-	-	99.59	-	-	-	-		
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Lingkup Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	148,100,000	-	-	-	-	147,820,500	-	-	-	-	99.81	-	-	-	-		
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Lingkup Sub Bidang Ketahanan Pangan Dan Pertanian	154,364,000	-	-	-	-	152,830,500	-	-	-	-	99.01	-	-	-	-		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH LINGKUP BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	1,261,402,000	-	-	-	-	1,256,215,600	-	-	-	-	99.59	-	-	-	-		
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Lingkup Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perhubungan	573,315,000	-	-	-	-	571,731,100	-	-	-	-	99.72	-	-	-	-		
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Lingkup Sub Bidang Pemukiman Dan Perumahan	17,383,000	-	-	-	-	17,383,000	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-		
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah	123,264,500	-	-	-	-	123,264,500	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-		
Pengembangan Bogor Planning Gallery	101,640,500	-	-	-	-	98,588,000	-	-	-	-	97.00	-	-	-	-		
Pengembangan Simpul Jaringan	445,799,000	-	-	-	-	445,249,000	-	-	-	-	99.88	-	-	-	-		
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH	738,996,000	-	-	-	-	736,986,000	-	-	-	-	99.73	-	-	-	-		
Kajian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah	368,970,000	-	-	-	-	368,970,000	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-		
Kajian Ekonomi dan Pembangunan	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		
Jaringan penelitian dan inovasi	370,026,000	-	-	-	-	368,016,000	-	-	-	-	99.46	-	-	-	-		

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN 17 =2020- 2024/5*100	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN PERANGKAT DAERAH	8,263,860,750	-	-	-	-	8,252,955,518	-	-	-	-	99.87	-	-	-	-		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	711,276,000	-	-	-	-	705,823,868	-	-	-	-	99.23	-	-	-	-		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	38,400,000	-	-	-	-	38,400,000	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	209,000,600	-	-	-	-	208,669,600	-	-	-	-	99.84	-	-	-	-		
Penyediaan Makanan dan Minuman	153,816,000	-	-	-	-	153,814,800	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-		
Pengelolaan Aset Perangkat Daerah	19,112,500	-	-	-	-	19,112,500	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-		
Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip PerangkatDaerah	80,445,000	-	-	-	-	80,385,000	-	-	-	-	99.93	-	-	-	-		
Pengelolaan Keamanan Kantor	293,920,000	-	-	-	-	293,920,000	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-		
Pengelolaan Kebersihan Kantor	593,352,800	-	-	-	-	593,352,800	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-		
Pengelolaan Legalitas Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	13,300,000	-	-	-	-	11,707,400	-	-	-	-	88.03	-	-	-	-		
Dukungan Manajemen bagi Komite Perencana Pembangunan Kabupaten Bogor	110,931,000	-	-	-	-	110,931,000	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-		
Penerapan dan Pemeliharaan SMM ISO		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	268,740,000	-	-	-	-	268,491,000	-	-	-	-	99.91	-	-	-	-		
Pengadaan Peralatan Kantor	418,640,000	-	-	-	-	418,594,000	-	-	-	-	99.99	-	-	-	-		
Pengadaan Perlengkapan Kantor	400,059,850	-	-	-	-	399,969,850	-	-	-	-	99.98	-	-	-	-		
Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik, Air dan Telekomunikasi	54,678,000	-	-	-	-	54,678,000	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Utama Kantor	1,787,749,015	-	-	-	-	1,787,409,500	-	-	-	-	99.98	-	-	-	-		
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	131,350,000	-	-	-	-	131,328,988	-	-	-	-	99.98	-	-	-	-		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	111,080,000	-	-	-	-	111,080,000	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-		

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN 17 =2020- 2024/5*100	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	101,100,000	-	-	-	-	101,100,000	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi	179,965,500	-	-	-	-	179,965,500	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-		
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	673,050,000	-	-	-	-	672,843,627	-	-	-	-	99.97	-	-	-	-		
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	923,606,000	-	-	-	-	922,606,000	-	-	-	-	99.89	-	-	-	-		
Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur	77,765,000	-	-	-	-	77,505,200	-	-	-	-	99.67	-	-	-	-		
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	65,000,000	-	-	-	-	64,335,000	-	-	-	-	98.98	-	-	-	-		
Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur	50,600,000	-	-	-	-	50,600,000	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-		
Penyusunan Pelaporan Keuangan	22,442,000	-	-	-	-	22,377,400	-	-	-	-	99.71	-	-	-	-		
Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	36,148,500	-	-	-	-	35,955,500	-	-	-	-	99.47	-	-	-	-		
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	12,261,000	-	-	-	-	12,261,000	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-		
Penyusunan Perencanaan Anggaran	21,771,000	-	-	-	-	21,771,000	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-		
Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	608,556,985	-	-	-	-	608,222,985	-	-	-	-	99.95	-	-	-	-		
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	15,744,000	-	-	-	-	15,744,000	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-		
Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	80,000,000	-	-	-	-	80,000,000	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-	2,056,426,103	3,469,161,796	3,333,476,063	3,392,648,174	-	2,029,782,032	3,375,043,309	3,216,584,491	3,241,468,351	-	98.70	97.29	96	95.54	12.05	-0.81
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	1,224,230,923	2,575,103,872	2,514,635,355	2,529,462,489	-	1,210,355,360	2,513,808,018	2,406,388,105	2,398,221,916	-	98.87	97.62	96	94.81	18.31	-1.04
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	-	158,780,650	393,279,504	538,281,224	621,458,045	-	157,657,150	386,825,875	475,065,765	585,724,300	-	99.29	98.36	88.26	94.25	40.65	38.83

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN 17 =2020- 2024/5*100	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020- 2024/5*100	18
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	-	483,726,570	562,030,394	545,725,296	524,643,422	-	480,877,025	539,375,844	527,732,111	474,651,268	-	99.41	95.97	96.70	90.47	2.05	-0.33
Pelaksanaan Konsultasi Publik	-	9,913,250	68,528,925	173,582,452	37,755,062	-	9,913,250	67,438,475	169,164,905	37,170,500	-	100.00	98.41	97.46	98.45	39.70	39.15
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	-	29,075,750	152,002,420	34,554,287	49,833,127	-	28,175,750	149,234,270	31,330,000	48,455,500	-	96.90	98.18	90.67	97.24	14.42	14.52
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	-	86,961,400	383,365,715	400,044,163	457,236,328	-	84,783,600	377,246,175	395,419,200	453,811,234	-	97.50	98.40	98.84	99.25	51.43	52.10
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	-	62,894,100	119,967,905	182,093,653	155,072,007	-	62,184,100	118,083,325	176,865,000	147,371,300	-	98.87	98.43	97.13	95.03	25.31	24.07
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	-	392,879,203	895,929,009	640,354,280	683,464,498	-	386,764,485	875,604,054	630,811,124	651,037,814	-	98.44	97.73	98.51	95.26	14.85	13.90
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	557,540,700	556,803,755	383,718,173	348,840,101	-	546,658,600	528,842,345	382,422,170	341,918,025	-	98.05	94.98	99.66	98.02	-11.06	-11.07
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-	211,085,700	147,411,755	-		-	208,924,700	133,704,905	-	-	-	98.98	90.70	-	-	-100.00	#VALUE!
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	-	346,455,000	409,392,000	383,718,173	348,840,101	-	337,733,900	395,137,440	382,422,170	341,918,025	-	97.48	96.52	99.66	98.02	0.17	0.31
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	274,654,480	337,254,169	334,461,672	322,659,215	-	272,768,072	332,392,946	329,985,548	317,146,626	-	99.31	98.56	98.66	98.29	4.11	3.84
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	-	204,322,040	160,554,604	128,635,902	251,628,187	-	203,292,161	159,722,341	126,557,808	248,394,826	-	99.50	99.48	98.38	98.72	5.34	5.14
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	70,332,440	176,699,565	205,825,770	71,031,028	-	69,475,911	172,670,605	203,427,740	68,751,800	-	98.78	97.72	98.83	96.79	0.25	-0.26
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-	-	100,660,863	191,686,369	-	-	-	97,788,668	184,181,784	-	-	-	97	96.08	#VALUE!	#VALUE!
Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-	-	100,660,863	191,686,369	-	-	-	97,788,668	184,181,784	-	-	-	97.15	96.08	#VALUE!	#VALUE!
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	1,879,622,706	4,558,714,781	5,186,390,858	9,692,540,716	-	1,857,875,611	4,500,555,185	4,989,577,711	9,598,078,785	-	98.84	98.72	96	99.03	50.69	50.76

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN 17 =2020- 2024/5*100	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020- 2024/5*100	18
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	434,319,893	1,568,495,256	1,350,085,092	2,149,965,680	-	433,705,716	1,552,461,214	1,311,879,967	2,127,924,134	-	99.86	98.98	97	98.97	49.16	48.83
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	67,619,740	94,166,109	193,098,579	355,832,489	-	67,533,761	94,046,784	188,143,118	349,795,821	-	99.87	99.87	97.43	98.30	51.46	50.86
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-	25,445,350	38,150,820	43,911,773	30,734,083	-	25,425,000	37,856,785	40,894,965	29,616,000	-	99.92	99.23	93.13	96.36	4.83	3.89
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-	26,390,350	49,886,715	62,283,283	35,359,630	-	26,390,350	49,416,438	58,468,780	34,373,000	-	100.00	99.06	93.88	97.21	7.59	6.83
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	-	-	312,362,140	285,619,024	102,500,714	-	-	311,098,030	280,999,350	100,846,500	-	-	99.60	98.38	98.39	#VALUE!	#DIV/0!
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	64,668,500	138,117,090	362,086,637	1,026,828,650	-	64,579,150	137,935,540	356,753,657	1,020,759,634	-	99.86	99.87	98.53	99.41	99.62	99.39
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	22,026,000	75,999,370	42,984,037	36,219,074	-	22,010,000	75,899,390	39,279,680	34,911,000	-	99.93	99.87	91.38	96.39	13.24	12.22
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	147,194,653	347,038,099	116,482,170	76,118,454	-	147,100,155	345,763,129	112,968,032	75,165,784	-	99.94	99.63	96.98	98.75	-15.20	-15.45
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	80,975,300	512,774,913	243,619,589	486,372,586	-	80,667,300	500,445,118	234,372,385	482,456,395	-	99.62	97.60	96.20	99.19	56.55	56.38
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	661,528,007	1,321,929,457	960,638,536	1,793,526,227	-	661,280,100	1,307,233,372	924,722,220	1,765,878,065	-	99.96	98.89	96.26	98.46	28.32	27.83
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	232,771,297	296,097,862	203,920,812	276,353,595	-	232,657,950	285,799,042	197,999,008	270,464,342	-	99.95	96.52	97.10	97.87	4.38	3.84

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN 17 =2020- 2024/5*100	REALISASI 18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020- 2024/5*100	18
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-	34,208,300	36,983,990	33,778,256	59,217,604	-	34,208,300	36,879,791	29,494,800	57,239,900	-	100.00	99.72	87.32	96.66	14.70	13.73
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-	70,790,500	72,718,885	128,862,668	45,740,847	-	70,785,500	72,688,885	124,542,466	43,995,500	-	99.99	99.96	96.65	96.18	-10.34	-11.21
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	-	111,072,075	531,221,670	157,725,437	1,047,206,472	-	110,942,615	530,355,170	151,810,550	1,036,176,655	-	99.88	99.84	96.25	98.95	75.23	74.82
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	107,359,035	131,671,631	151,216,135	223,987,999	-	107,359,035	128,662,766	148,160,221	221,613,768	-	100.00	97.71	97.98	98.94	20.18	19.86
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-	33,350,700	57,635,567	103,868,936	64,255,878	-	33,350,700	57,619,964	98,987,825	61,947,400	-	100.00	99.97	95.30	96.41	17.82	16.74
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-	39,894,300	65,315,959	50,100,262	44,275,914	-	39,894,300	65,295,184	47,833,750	43,083,900	-	100.00	99.97	95.48	97.31	2.64	1.94
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	-	32,081,800	130,283,893	131,166,030	32,487,918	-	32,081,700	129,932,570	125,893,600	31,356,600	-	100.00	99.73	95.98	96.52	0.31	-0.57
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	783,774,806	1,668,290,068	2,875,667,230	5,749,048,809	-	762,889,795	1,640,860,599	2,752,975,524	5,704,276,586	-	97.34	98.36	95.73	99.22	64.57	65.36
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur	-	127,677,969	206,999,031	186,191,895	1,314,483,180	-	127,613,140	206,223,111	180,959,908	1,304,306,934	-	99.95	99.63	97.19	99.23	79.13	78.80
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-	55,799,962	94,593,856	57,912,697	37,490,380	-	55,796,512	94,441,106	55,386,000	35,700,000	-	99.99	99.84	95.64	95.22	-9.46	-10.56
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-	114,233,950	51,971,318	36,322,696	46,248,529	-	109,963,450	51,964,539	35,479,434	45,668,500	-	96.26	99.99	97.68	98.75	-20.23	-19.72

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN 17 =2020- 2024/5*100	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020- 2024/5*100	18
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	-	365,183,900	901,294,185	407,848,844	1,357,494,566	-	348,860,900	876,780,185	402,875,790	1,356,341,200	-	95.53	97.28	98.78	99.92	38.85	40.42
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kewilayahan	-	49,664,190	115,987,693	194,931,630	182,271,598	-	49,574,361	115,924,693	161,943,103	174,429,109	-	99.82	99.95	83.08	95.70	38.41	36.96
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	-	45,953,290	49,607,540	122,935,360	76,555,946	-	45,843,632	48,383,540	101,817,808	63,453,784	-	99.76	97.53	82.82	82.89	13.61	8.47
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	-	16,145,645	46,108,805	63,035,874	50,564,069	-	16,141,900	45,998,785	62,126,653	49,914,884	-	99.98	99.76	98.56	98.72	33.03	32.61
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	-	9,115,900	201,727,640	1,806,488,234	2,683,940,541	-	9,095,900	201,144,640	1,752,386,828	2,674,462,175	-	99.78	99.71	97.01	99.65	314.23	314.09
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	2,043,000,779	2,013,724,480	1,408,832,953	3,202,656,210	-	2,040,321,211	2,011,295,573	1,387,179,628	3,169,369,789	-	99.87	99.88	98.46	98.96	11.89	11.64
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-	-	-	99,959,925	-	-	-	-	98,127,000	-	-	99.96	98	98.17	#VALUE!	#VALUE!
Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	-	-	-	-	99,959,925	-	-	-	-	98,127,000	-	-	-	-	98.17	#VALUE!	#VALUE!
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	784,273,600	779,979,585	450,848,990	498,660,502	-	783,896,900	779,686,375	441,771,115	490,363,000	-	99.95	99.96	97.99	98.34	-10.70	-11.07
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	-	784,273,600	779,979,585	365,979,932	498,660,502	-	783,896,900	779,686,375	359,684,310	490,363,000	-	99.95	99.96	98.28	98.34	-10.70	-11.07
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	84,869,058	-	-	-	-	82,086,805	-	-	-	-	96.72	-	#VALUE!	#VALUE!
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	727,324,529	532,451,645	332,564,534	2,110,033,887	-	726,718,711	532,415,578	323,792,228	2,097,973,984	-	99.92	99.99	97.36	99.43	30.51	30.35
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	727,324,529	-	-	99,959,925	-	726,718,711	-	-	97,927,000	-	99.92	-	-	97.97	-39.11	-39.41

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN 17 =2020- 2024/5*100	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	66,267,032	-	-	-	-	65,166,160	-	-	-	-	98.34	-	#VALUE!	#VALUE!
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	-	-	532,451,645	204,871,851	151,569,305	-	-	532,415,578	198,467,508	148,811,784	-	-	99.99	96.87	98.18	#VALUE!	#VALUE!
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!
Penelitian dan Pengembangan Penataan ruang dan pertanahan	-	-	-	61,425,651	-	-	-	-	60,158,560	-	-	-	-	97.94	-	#VALUE!	#VALUE!
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!
Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	-	-	-	-	99,959,925	-	-	-	-	98,127,000	-	-	-	-	98.17	#VALUE!	#VALUE!
Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	1,758,544,732	-	-	-	-	1,753,108,200	-	-	-	-	99.69	#VALUE!	#VALUE!
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	531,402,650	701,293,250	625,419,429	494,001,896	-	529,705,600	699,193,620	621,616,285	482,905,805	-	99.68	99.70	99.39	97.75	-1.81	-2.29
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	-	403,555,250	516,741,050	463,346,420	365,227,548	-	402,443,200	515,523,535	460,760,050	358,840,705	-	99.72	99.76	99.44	98.25	-2.46	-2.83
Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikas dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	-	888,550	-	20,040,613	30,371,436	-	888,550	-	19,647,350	29,576,700	-	100.00	-	98.04	97.38	141.79	140.20
diseminasi jenis, prosedur dan metoda penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif	-	120,126,750	141,092,695	131,399,189	58,246,357	-	119,541,750	140,210,595	130,908,885	57,084,500	-	99.51	99.37	99.63	98.01	-16.55	-16.87
sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbang	-	6,832,100	43,459,505	10,633,207	30,247,542	-	6,832,100	43,459,490	10,300,000	29,677,900	-	100.00	100.00	96.87	98.12	45.06	44.37
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	-	-	-	-	9,909,013	-	-	-	-	7,726,000	-	-	-	-	77.97	#VALUE!	#VALUE!
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	22,687,520,974	22,919,102,936	22,776,679,849	22,776,679,849	-	22,440,158,765	22,503,863,059	22,375,840,328	26,773,181,877	-	98.91	98.20	98.24	98.43	0.10	4.51
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	192,258,700	391,172,585	525,464,935	432,346,530	-	191,164,250	385,828,098	511,642,865	418,483,500	-	99.43	98.63	97.37	96.79	22.46	21.64
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	61,593,450	188,417,990	245,777,563	121,939,178	-	60,565,000	188,050,254	241,503,555	118,684,675	-	98.33	99.80	98.26	97.33	18.62	18.32

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN 17 =2020- 2024/5*100	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	17,315,500	16,215,774	16,460,458	20,217,447	-	17,315,500	15,641,840	14,861,020	18,309,000	-	100.00	96.46	90.28	90.56	3.95	1.40
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	12,858,400	11,582,322	15,619,546	18,409,587	-	12,858,400	11,135,600	15,066,545	17,354,000	-	100.00	96.14	96.46	94.27	9.39	7.78
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	16,948,732	27,976,670	21,984,744	-	-	15,348,732	27,202,780	20,609,000	-	-	90.56	97.23	93.74	#VALUE!	#DIV/0!
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	-	14,598,803	28,593,636	17,444,621	-	-	13,398,798	27,920,494	16,533,100	-	-	91.78	97.65	94.77	#VALUE!	#DIV/0!
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	21,655,150	28,268,925	76,361,194	88,848,929	-	21,625,150	27,160,953	72,940,480	85,143,725	-	99.86	96.08	95.52	95.83	42.32	40.86
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	78,836,200	115,140,039	114,675,868	143,502,024	-	78,800,200	115,091,921	112,147,991	141,850,000	-	99.95	99.96	97.80	98.85	16.15	15.83
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	16,296,398,108	17,450,433,492	16,735,832,705	17,528,351,138	-	16,111,531,444	17,148,169,963	16,511,928,146	17,287,903,654	-	98.87	98.27	98.66	98.63	1.84	1.78
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	15,801,967,678	16,933,869,242	16,555,803,463	17,441,309,825	-	15,617,851,606	16,633,455,988	16,346,129,438	17,204,815,984	-	98.83	98.23	98.73	98.64	2.50	2.45
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	445,890,630	415,185,039	87,161,970	28,931,352	-	445,159,688	414,159,604	82,544,715	27,476,700	-	99.84	99.75	94.70	94.97	-49.53	-50.16
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	13,514,850	28,644,315	20,256,115	7,733,823	-	13,514,850	28,316,036	18,600,302	7,233,070	-	100.00	98.85	91.83	93.53	-13.02	-14.47
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	11,183,550	17,910,790	17,910,738	23,326,121	-	11,183,550	17,910,790	15,931,035	22,695,500	-	100.00	100.00	88.95	97.30	20.18	19.35
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	15,029,450	39,209,910	54,700,419	27,050,017	-	15,009,800	38,910,262	48,722,656	25,682,400	-	99.87	99.24	89.07	94.94	15.83	14.37
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	8,811,950	15,614,196	-	-	-	8,811,950	15,417,283	-	-	-	100.00	98.74	-	-	#VALUE!	#VALUE!
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	31,426,700	34,600,925	32,157,036	23,823,428	-	31,426,700	34,501,925	27,588,950	23,222,600	-	100.00	99.71	85.79	97.48	-6.69	-7.28
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang milik Daerah SKPD	-	6,962,400	12,250,500	8,050,359	7,371,534	-	6,962,400	12,226,500	7,883,200	7,224,700	-	100.00	99.80	97.92	98.01	1.44	0.93
pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	-	15,601,600	-	-	9,006,180	-	15,601,600	-	-	8,764,400	-	100.00	-	-	97.32	-12.83	-13.43
rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	-	8,862,700	10,893,815	9,146,263	-	-	8,862,700	10,818,815	6,999,000	-	-	100.00	99.31	76.52	-	-	#VALUE!
penataan barang milik daerah pada SKPD	-	-	11,456,610	14,960,414	7,445,714	-	-	11,456,610	12,706,750	7,233,500	-	100.00	100.00	84.94	97.15	#DIV/0!	#VALUE!

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN 17 =2020- 2024/5*100	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	151,826,900	456,350,155	599,655,630	739,239,869	-	151,184,850	452,130,001	590,388,535	709,212,180	-	99.58	99.08	98.45	95.94	48.55	47.17
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	45,282,350	2,198,460	-	-	-	45,145,500	2,198,460	-	-	-	99.70	100.00	-	-	-	#VALUE!
Pengadaan Pakaian Dinas dan atribut kelengkapannya	-	51,060,000	120,067,763	-	-	-	50,912,000	119,619,500	-	-	-	99.71	99.63	-	-	-	#VALUE!
Pendataan dan Pengelolaan Administrasi kepegawaian	-	3,763,750	14,979,435	15,077,519	20,587,836	-	3,763,750	14,965,185	13,588,600	15,400,100	-	100.00	99.90	90.12	74.80	52.93	42.22
Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	-	-	14,141,050	-	-	-	-	14,062,409	-	-	-	-	99.44	-	-	-	#VALUE!
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	44,220,800	55,000,000	212,190,013	48,932,467	-	43,863,600	54,700,000	209,555,025	48,012,500	-	99.19	99.45	98.76	98.12	2.56	2.29
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	7,500,000	17,850,000	-	127,427,555	-	7,500,000	14,830,000	-	123,335,100	-	100.00	83.08	-	96.79	103.03	101.38
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	29,812,300	72,094,864	17,384,236	-	-	29,812,300	70,559,000	15,162,900	-	-	100.00	97.87	87.22	-	#DIV/0!
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	202,301,147	300,293,234	524,907,775	-	-	201,942,147	296,685,910	507,301,580	-	-	99.82	98.80	96.65	-	#DIV/0!
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1,373,155,125	1,728,001,182	1,463,653,561	2,021,978,960	-	1,362,515,033	1,701,496,405	1,410,030,979	1,955,680,227	-	99.23	98.61	96.34	96.72	10.16	9.46
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	82,241,900	94,259,310	94,582,446	119,470,689	-	82,023,700	94,016,100	90,595,800	115,577,000	-	99.73	99.74	95.79	96.74	9.78	8.95
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	192,181,250	458,367,145	248,790,766	743,358,568	-	188,557,900	458,069,000	236,195,000	716,885,000	-	98.11	99.93	94.94	96.44	40.24	39.64
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	310,115,600	-	218,495,231	158,063,948	-	305,388,200	-	218,078,300	148,666,500	-	98.48	99.38	99.81	94.05	-15.51	-16.47
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	65,925,625	111,041,800	78,800,100	91,005,960	-	65,362,500	96,332,600	77,631,100	88,414,600	-	99.15	86.75	98.52	97.15	8.39	7.84
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	126,648,900	119,212,210	111,535,409	172,787,820	-	126,414,150	117,405,310	77,381,900	162,349,800	-	99.81	98.48	69.38	93.15	8.08	6.45
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	38,400,000	22,560,000	-	-	-	38,400,000	22,560,000	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-100.00	-100.00
Fasilitas Kunjungan Tamu	-	103,565,000	177,675,000	89,000,000	69,255,000	-	102,734,600	169,215,200	88,966,500	57,330,000	-	99.20	95.24	99.96	82.78	-9.57	-13.57
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	187,235,000	596,332,000	516,080,000	505,942,054	-	187,208,133	596,301,978	516,024,329	505,934,877	-	99.99	99.99	99.99	100	28.21	28.22
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	7,110,000	11,731,977	16,619,975	24,747,396	-	7,110,000	11,427,225	15,971,050	24,027,000	-	100.00	97.40	96.10	97.09	36.59	35.58

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN 17 =2020- 2024/5*100	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020- 2024/5*100	18
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	259,731,850	136,821,740	89,749,634	137,347,526	-	259,315,850	136,168,992	89,187,000	136,495,450	-	99.84	99.52	99.37	99.38	-14.72	-14.82
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1,687,861,175	228,116,840	366,924,320	912,910,327	-	1,648,618,400	227,691,500	356,220,000	900,965,000	-	97.67	99.81	97.08	98.69	-14.24	-14.02
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	1,326,937,500	-	-	-	-	1,289,390,000	-	-	-	-	97.17	99.73	-	-	-	#VALUE!
Pengadaan Mebel	-	163,707,000	21,397,200	74,048,100	-	-	163,455,000	21,368,500	73,400,000	-	-	99.85	99.87	99.12	-	-	#VALUE!
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	6,612,500	59,485,625	112,129,980	194,450,300	-	6,610,000	59,324,500	111,600,000	188,160,000	-	99.96	99.73	99.53	96.77	132.87	130.98
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	55,068,325	36,398,565	53,286,660	718,460,027	-	55,048,400	36,331,500	53,280,000	712,805,000	-	99.96	99.82	99.99	99.21	90.05	89.70
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	135,535,850	110,835,450	127,459,580	-	-	134,115,000	110,667,000	117,940,000	-	-	98.95	99.85	92.53	-	-	#VALUE!
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1,472,615,066	1,625,306,107	1,962,185,729	1,916,165,132	-	1,467,438,219	1,581,171,551	1,919,552,281	1,867,624,280	-	99.65	97.28	97.83	97.47	6.80	6.21
Penyedia Jasa surat menyurat	-	3,750,000	7,120,000	7,000,000	5,600,000	-	3,750,000	7,120,000	7,000,000	5,600,000	-	100.00	100.00	100.00	100	10.55	10.55
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	-	801,396,720	888,396,585	768,396,585	827,135,718	-	798,477,046	853,264,035	753,816,343	782,982,830	-	99.64	96.05	98.10	94.66	0.79	-0.49
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	-	5,000,000	16,500,000	-	-	-	5,000,000	6,270,000	-	-	-	100.00	98.61	-	-	-100.00	-100.00
penyediaan jasa pelayanan umum kantor	-	662,468,346	713,289,522	1,186,789,144	1,083,429,414	-	660,211,173	704,517,516	1,158,735,938	1,079,041,450	-	99.66	98.77	97.64	99.59	13.09	13.07
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1,481,979,200	1,005,121,650	1,090,805,933	3,624,986,370	-	1,476,279,869	972,873,616	1,048,488,572	3,610,090,436	-	99.62	96.79	96.12	99.59	25.06	25.05
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan	-	167,029,200	199,347,150	248,860,000	246,255,000	-	165,488,269	186,438,516	234,747,883	235,517,606	-	99.08	93.52	94.33	95.64	10.19	9.22
pemeliharaan mebel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	-	106,100,000	93,214,000	144,577,500	134,043,800	-	105,880,500	92,589,800	130,744,340	132,708,000	-	99.79	99.33	90.43	99.00	6.02	5.81
pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	-	1,056,050,000	523,642,500	199,420,000	2,956,879,330	-	1,052,339,500	520,586,000	197,190,719	2,956,879,330	-	99.65	99.42	98.88	100	29.36	29.47
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	137,800,000	174,068,000	233,280,950	40,626,000	-	137,671,600	158,478,000	222,774,578	38,911,700	-	99.91	91.04	95.50	95.78	-26.31	-27.09

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2020-2024/5*100	18
pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan	-	15,000,000	14,850,000	264,667,483	247,182,240	-	14,900,000	14,781,300	263,031,052	246,073,800	-	99.33	99.54	99.38	99.55	101.48	101.59

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappedalitbang Tahun 2020-2024 pada tabel 2.2 diatas, disampaikan bahwa berdasarkan jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada evalausi Renja Tahun 2024 dari 4 Program, 19 Kegiatan dan 87 Sub Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor dapat digambarkan pada evaluasi masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara lain:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 26.773.181.877,00 (98,62%) dari total anggaran Rp. 27.199.801.755,00, dengan realisasi fisik 100,00%. Program ini terdiri dari 8 kegiatan dan 40 Sub Kegiatan sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 7 Sub Kegiatan, dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 418.483.500,00 (96,79%) dari total anggaran Rp. 432.346.530,00 dan realisasi fisik 100,00%, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 118.684.675,00 (97,33%) dari total anggaran Rp. 121.939.178,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 18.309.000,00 (90,56%) dari total anggaran Rp. 20.217.447,00 dengan realisasi fisik masih 100,00%;
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 17.354.000,00 (94,27%) dari total anggaran Rp.18.409.587,00 dengan realisasi fisik masih 100,00%;
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 20.609.000,00 (93,74%) dari total anggaran Rp. 21.984.744,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.

16.533.100,00 (94,77%) dari total anggaran Rp. 17.444.621,00 dengan realisasi fisik 100,00%;

6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 84.843.725,00 (95,83%) dari total anggaran Rp. 85.143.725,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Realisasi Kinerja SKPD Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 141.850.000,00 (98,85%) dari total anggaran Rp. 143.502.024,00 dengan realisasi fisik 100,00%.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 5 Sub Kegiatan, dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini sebesar Rp. 17.287.903.654,00 (98,63%) dari total anggaran Rp. 17.528.351.138,00 dengan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 17.204.815.984,00 (98,64%) dari total anggaran Rp. 17.441.309.825,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 27.476.700,00 (94,97%) dari total anggaran Rp. 28.931.352,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 7.233.070,00 (93,53%) dari total anggaran Rp. 7.733.823,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 22.695.500,00 (97,30%) dari total anggaran Rp. 23.326.121,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Realisasi Kinerja SKPD Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 25.682.400,00 (94,94%) dari total anggaran Rp. 27.050.017,00 dengan realisasi fisik 100,00%;

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar ini Rp. 23.222.600,00 (97,48%) dari total anggaran Rp. 23.823.428,00 dengan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 7.224.700,00 (98,01%) dari total anggaran Rp. 7.371.534 dengan realisasi fisik 100,00%;
2. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD pada SKPD Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 8.764.400,00 (97,32%) dari total anggaran Rp.9.006.180,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 7.233.500,00 (97,15%) dari total anggaran Rp. 7.445.714,00 dengan realisasi fisik 100,00%.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 5 Sub Kegiatan Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar ini Rp. 709.212.180,00 (95,94%) dari total anggaran Rp. 739.239.869,00 dengan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 15.400.100,00 (74,80%) dari total anggaran Rp.20.587.836,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
2. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 48.012.500,00 (98,12%) dari total anggaran Rp. 48.932.467,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.123.335.100,00 (96,79%) dari total anggaran Rp.127.427.555,00 dengan realisasi fisik 100,00%;

4. Sosialisasi Peraturan Perundang-Perundangan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.15.162.900,00 (87,22%) dari total anggaran Rp.17,384.236,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
5. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.507.301.580,00 (96,65%) dari total anggaran Rp.524.907.775,00 dengan realisasi fisik 100,00%.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 9 Sub Kegiatan Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.955.680.227,00 (96,72%) dari total anggaran Rp. 2.021.978.961,00 dengan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.115.577.000,00 (96,74%) dari total anggaran Rp.119.470.689,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 716.885.000,00 (96,44%) dari total anggaran Rp. 743.358.568,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.148.666,500,00 (94,05%) dari total anggaran Rp.158.063.948,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.88.414.600,00 (97,15%) dari total anggaran Rp.91.009.560,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.162.349.800,00 (93,96%) dari total anggaran Rp.172.787.820,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu Realisasi Kinerja SKPD Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar

Rp.57.330.000,00 (82,78%) dari total anggaran Rp.69.255.000,00 dengan realisasi fisik 100,00%;

7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.505.934.800,00 (100,00%) dari total anggaran Rp.505.942.054,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.24.027.000,00 (97,09%) dari total anggaran Rp.24.747.396,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
9. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.136.495.450,00 (99,38%) dari total anggaran Rp.137.347.526,00 dengan realisasi fisik 100,00%.

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 900.965.000,00 (98,69%) dari total anggaran Rp. 912.910.327,00 dengan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.188.160.000,00 (96,77%) dari total anggaran Rp.194.450,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 712.805.000,00 (99,21%) dari total anggaran Rp.718.460.027,00 dengan realisasi fisik 100,00%.

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.867.624.280,00 (97,47%) dari total anggaran Rp. 1 1.916.165.132,00 dengan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.5.600.000,00 (100,00%) dari total anggaran Rp.5.600.000,00 dengan realisasi fisik 100,00%;

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.782.982.830,00 (94,66%) dari total anggaran Rp.827.135.718,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.0 (0,00%) dari total anggaran Rp.528.000,00 dengan realisasi fisik 0,00%. Sub Kegiatan ini di drop di Anggaran Perubahan Reguler;
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.1.079.041.450,00 (100,00%) dari total anggaran Rp.1.083.429.414,00 dengan realisasi fisik 100,00%.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 5 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 3.610.090.436,00 (99,59%) dari total anggaran Rp. 3.624.986.370,00 dengan realisasi fisik 100,00%, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.235.517.606,00 (95,64%) dari total anggaran Rp.246.255.000 dengan realisasi fisik 100,00%;
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.132.708.000,00 (99,00%) dari total anggaran Rp.134.043.800,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.2.956.879.330,00 (100,00%) dari total anggaran Rp.2.956.879.330,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.38.911.700,00 (95,78%) dari total anggaran Rp.40.626.000,00 dengan realisasi fisik 100,00%;

5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.246.073.800,00 (99,55%) dari total anggaran Rp.247.182.240,00 dengan realisasi fisik 100,00%.

B. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 3.241.468.351,00 (95,54%) dari total anggaran Rp. 3.392.648.174,00 dengan realisasi fisik 100,00%. Program ini terdiri dari 4 kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Kegiatan ini terdiri dari 7 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 2.398.221.916,00 (94,81%) dari total anggaran Rp. 2.529.462.489,00 dengan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.585.724.300,00 (94,25%) dari total anggaran Rp. 621.458.045,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
2. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.474.651.268,00 (90,47%) dari total anggaran Rp.524.643.422,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
3. Pelaksanaan Konsultasi Publik Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.37.170.500,00 (98,45%) dari total anggaran Rp.37.755.062 dengan realisasi fisik 100,00%;
4. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.48.455.500,00 (97,24%) dari total anggaran Rp.49.833.127,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
5. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.453.811.234,00 (99,25%) dari total anggaran Rp.457.236.328,00 dengan realisasi fisik 100,00%;

6. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.147.371.300,00 (95,19%) dari total anggaran Rp.155.072.007,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
7. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp651.037.814,00 (95,26%) dari total anggaran Rp.683.464.498,00 dengan realisasi fisik 100,00%.

b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 341.918.025,00 (98,02%) dari total anggaran Rp. 348.840.101,00 dengan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 341.918.025,00 (98,02%) dari total anggaran Rp. 348.840.101,00 dengan realisasi fisik 100,00%.

c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 317.146.626,00 (98,29%) dari total anggaran Rp. 322.659.215,00 dengan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 248.394.826,00 (98,72%) dari total anggaran Rp. 251.628.187,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 68.751.800,00 (96,79%) dari total anggaran Rp. 71.031.028,00 dengan realisasi fisik 100,00%.

d. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 184.181.784,00 (96,08%) dari total anggaran Rp. 191.686.369,00 dan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 184.181.784,00 (96,08%) dari total anggaran Rp. 191.686.369,00 dan realisasi fisik 100,00%.

C. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 9.598.078.785,00 (99,03%) dari total anggaran Rp. 9.692.540.716,00 dengan realisasi fisik 100,00%.

Program ini terdiri dari 3 kegiatan sebagai berikut:

a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kegiatan ini terdiri dari 8 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 2.127.924.134,00 (98,97%) dari total anggaran Rp. 2.149.965.685,00 dengan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 349.795.821,00 (98,30%) dari total anggaran Rp. 355.832.489,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.29.616.000,00 (96,36%) dari total anggaran Rp.30.734.083,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.34.373.000,00 (97,21%) dari total anggaran Rp.35.359.630,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 100.846.500,00

(98,39%) dari total anggaran Rp.102.500.719,00 dengan realisasi fisik 100,00%;

5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.1.020.759.634,00 (99,41%) dari total anggaran Rp.1.026.828.650,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 34.911.000,00 (96,39%) dari total anggaran Rp.36.219.074,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.75.165.784,00 (98,75%) dari total anggaran Rp.76.118.454,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.482.456.395,00 (99,16%) dari total anggaran Rp.486.372.586,00 dengan realisasi fisik 100,00%.

b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Kegiatan ini terdiri dari 8 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.765.878.065,00 (98,46%) dari total anggaran Rp. 1.793.526.227,00 dan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.270.464.342,00 (97,87%) dari total anggaran Rp.276.353.595,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.57.239.900,00 (97,62%) dari total anggaran Rp.59.217.604,00 dengan realisasi fisik 100,00%;

3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.43.995.500,00 (96,18%) dari total anggaran Rp.45.740.847,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.1.036.176.655,00 (98,95%) dari total anggaran Rp.1.047.206.472,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.221.613.768,00 (98,94%) dari total anggaran Rp.223.987.999,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.61.947.400,00 (96,41%) dari total anggaran Rp.64.255.878,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.43.083.900,00 (97,31%) dari total anggaran Rp.44.275.914,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.31.356.600,00 (96,52%) dari total anggaran Rp.32.487.918,00 dengan realisasi fisik 100,00%.

c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Kegiatan ini terdiri dari 8 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 5.704.276.586,00 (99,60%) dari total anggaran Rp. 5.749.048.809,00 dan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar

- Rp.1.304.306.934,00 (99,23%) dari total anggaran Rp.1.314.483.180,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.35.7000.000,00 (96,40%) dari total anggaran Rp.37.490.380,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
 3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.45.668.500,00 (98,75%) dari total anggaran Rp.46.248.529,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
 4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.1.356.341.200,00 (99,92%) dari total anggaran Rp.1.357.494.566,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
 5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.174.429.109,00 (95,70%) dari total anggaran Rp.182.271.598,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
 6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.63.453.784,00 (82,72%) dari total anggaran Rp.76.555.946,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
 7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 49.914.884,00 (98,72%) dari total anggaran Rp.50.564.069,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
 8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.2.674.462.175,00 (99,65%) dari total anggaran Rp.2.683.940.541,00 dengan realisasi fisik 100,00%.

D. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 3.169.369.789,00 (98,99%) dari total anggaran Rp. 3.202.656.210,00 dengan realisasi fisik 100,00%. Program ini terdiri dari 4 kegiatan sebagai berikut:

a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 98.127.000,00 (98,17%) dari total anggaran Rp. 99.959.925,00 dan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan PeraturanRealisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 98.127.000,00 (98,17%) dari total anggaran Rp. 99.959.925,00 dengan realisasi fisik 100,00%.

b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 490.3633.000,00 (98,34%) dari total anggaran Rp. 498.660.502,00 dan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 490.3633.000,00 (98,34%) dari total anggaran Rp. 498.660.502,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
2. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.0 (0,00%) dari total anggaran Rp.4.643.589,00 dengan realisasi fisik 0,00%, sub kegiatan ini di drop di Anggaran Perubahan Reguler.

c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 2.097.973.984,00 (99,43%) dari total anggaran Rp. 2.110.033.887,00 dan realisasi fisik 70,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar

Rp.148.811.784,00 (98,18%) dari total anggaran Rp.151.569.305,00 dengan realisasi fisik 100,00%;

2. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 97.927.000,00 (97,97%) dari total anggaran Rp.99.959.925,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
3. Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.98.127.000,00 (98,17%) dari total anggaran Rp. 99.959.925,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
4. Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.1.753.108.200,00 (99,66%) dari total anggaran Rp.1.758.544.732,00 dengan realisasi fisik 100,00%.

d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Kegiatan ini terdiri dari 5 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 482.905.805,00 (97,75%) dari total anggaran Rp. 494.001.896,00 dengan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.358.840.705,00 (98,25%) dari total anggaran Rp.365.227.548,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
2. Uji coba dan Penerapan rancang Bangun/ Model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.29.576.700,00 (97,38%) dari total anggaran Rp.30.371.436,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
3. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.57.084.500,00 (98,00%) dari total anggaran Rp.58.246.357,00 dengan realisasi fisik 100,00%;
4. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar

Rp.29.677.900,00 (98,12%) dari total anggaran Rp.30.247.542,00 dengan realisasi fisik 100,00%;

5. Fasilitasi Hak Kekayaan intelektual Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.7.726.000,00 (77,97%) dari total anggaran Rp.9.909.013,00 dengan realisasi fisik 100,00%.

Dengan Uraian laporan diatas dapat disimpulkan realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 42.782.098.802,00 (98,38%), dari total anggaran sebesar Rp. 43.487.646.855,00 dengan realisasi fisik (100,00%). Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan adalah pihak-pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan organisasi Perangkat Daerah. Adapun Kelompok Sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor adalah semua Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor, DPRD, Instansi Vertical, Akademisi dan Masyarakat Kabupaten Bogor.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Melalui keterpaduan proses perencanaan diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini belum optimal dalam proses perencanaan. Indikasinya ditandai masih adanya kesenjangan realisasi usulan rencana program/kegiatan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang dapat diakomodir dalam anggaran pendapat dan belanja daerah selama ini. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor memiliki peran penting dan utama dalam menjaga konsistensi dan kualitas dokumen perencanaan pembangunan di daerah.

Sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian permasalahan yang di hadapi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor antara lain:

1. Perencanaan Pembangunan belum berkualitas;
2. Hasil riset dan Inoavsi belum berkualitas;
3. Koordinasi kebijakan dan pengelolaan pembangunan daerah yang belum optimal;

Wilayah Provinsi Jawa Barat yang luas dan jumlah penduduk yang besar merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan daerah yang semakin kompleks. Birokrasi yang terkait dengan seperangkat regulasi juga dihadapkan dengan tuntutan perubahan yang cepat dan responsif terhadap pelayanan kepada masyarakat. Kolaborasi dan partisipasi akan menjadi keharusan dalam pengelolaan daerah seiring dengan meningkatnya pendidikan masyarakat. Kualitas tata kelola pemerintahan merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Permasalahan yang ditemukan dalam KLHS Kabupaten Bogor umumnya terkait dengan dampak pembangunan yang tidak sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, masalah-masalah tersebut meliputi:

a. Tekanan lingkungan hidup

Pertumbuhan penduduk dan pembangunan infrastruktur yang pesat di Kabupaten Bogor meningkatkan tekanan terhadap lingkungan. Hal ini menyebabkan konversi lahan hijau menjadi permukiman dan kawasan industri, yang pada gilirannya mengurangi fungsi ekologis lahan.

b. Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan

Pembangunan yang tidak terkendali seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran Air, Pencemaran Udara, dan Degradasi Lahan.

Pada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Bogor Tahun 2022-2052, terdapat indikasi arah kebijakan yang meliputi indikasi arahan bagi rencana adaptasi dan mitigasi

terhadap perubahan iklim. Rumusan kebijakan ini dampak negatif karena adanya perubahan kondisi lingkungan hidup yang diakibatkan oleh perubahan iklim.

Tabel 2. 3
Perumusan Permasalahan Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor

URAIAN	PERMASALAHAN
Terwujudnya perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi yang berkualitas	Perencanaan pembangunan belum berkualitas
	Hasil Riset dan Inovasi belum berkualitas
	Belum optimalnya capaian kinerja pemerintah daerah
Pelayanan prima tata kelola pemerintahan (<i>Good Governance</i>)	Koordinasi Kebijakan dan pengelolaan pembangunan daerah yang belum optimal

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang haarus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Dalam usaha mengembangkan pelayanan Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan analisa terhadap lingkungan didalam maupun diluar organisasi. Kondisi lingkungan ini dapat menggambarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terhadap pencapaian visi dan misi organisasi yang mengacu pada analisis sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 4
Perumusan Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi
Daerah Kabupaten Bogor

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	PROVINSI	
Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	Perencanaan pembangunan belum berkualitas	Koordinasi Kebijakan dan pengelolaan pembangunan daerah yang belum optimal	Perencana an Pembangu nan Berkelanj utan	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
	Hasil Riset dan Inovasi belum berkualitas	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Sumber Daya	Perencana an Pembangu nan Berkelanj utan	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Kualitas hasil riset dan inovasi
	Koordinasi Kebijakan dan pengelolaan pembangunan daerah yang belum optimal	Koordinasi Kebijakan dan pengelolaan pembangunan daerah yang belum optimal	Perencana an Pembangu nan Berkelanj utan	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja

BAB III

TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarki dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2025- 2029. Merujuk pada Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 adalah:

“Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang”

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor dimaksud adalah:

1. **Kabupaten Bogor** adalah sebuah kabupaten di bagian Barat, Provinsi Jawa Barat. Secara administratif, Kabupaten Bogor berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi di sebelah Utara; Kabupaten Karawang di sebelah Timur, Kabupaten Cianjur di sebelah Tenggara, Kabupaten Sukabumi di sebelah Selatan, serta Kabupaten Lebak Provinsi Banten di sebelah Barat. Kabupaten Bogor memiliki semboyan **“Prayoga, Tohaga, Sayaga” - “Kuta Udaya Wangsa”**. Prayoga artinya Utama, Tohaga artinya Kokoh dan Kuat, Sayaga artinya Sedia atau Siap Siaga, yang memiliki makna pendirian dan perjuangan masyarakat Kabupaten Bogor hendaknya selalu mengutamakan kekokohan, kuat pada pendirian dan perjuangannya serta selalu siap siaga menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai cita-cita, mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sementara Kuta artinya Kota, Udaya artinya Fajar atau Kebangkitan, Wangsa artinya Bangsa atau Suku Bangsa, yang memiliki makna bahwa Kabupaten Bogor dengan dukungan masyarakatnya akan menjadi pusat kebangkitan bagi perjuangan pembangunan untuk memperoleh kemajuan dan kemakmuran bangsa.
2. **Istimewa**, singkatan dari Inspiratif, Merakyat dan Wibawa, yang dijelaskan sebagai berikut:

- **Inspiratif** adalah kepemimpinan dari Bupati dan Wakil Bupati Bogor harus dapat menjadi teladan bagi bawahannya serta memberikan inspirasi kepada masyarakat yang dipimpinnya.
- **Merakyat** adalah sosok Bupati dan Wakil Bupati harus menjadi panutan dan harus mampu menyelesaikan segala bentuk masalah dengan sikap dan perilaku merakyat, dalam arti ramah kepada masyarakat dengan mengedepankan sikap profesionalisme dan memberikan pelayanan terbaik yang memuaskan masyarakat.
- **Wibawa** adalah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati harus mampu mewujudkan kewibawaan Kabupaten Bogor kepada seluruh masyarakat dan pemerintahan lainnya.

Dengan demikian, **Istimewa** adalah kondisi dengan kekhasan tertentu yang merupakan aktualisasi dari kerja konkrit Pemerintah Kabupaten Bogor yang Inspiratif, Merakyat dan Berwibawa, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor untuk menjadi masyarakat yang terbaik.

3. **Gemilang**, merupakan perwujudan kinerja pembangunan daerah selama lima tahun, yang menunjukkan peningkatan (kemajuan) yang optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ditandai dengan pelampauan dalam pencapaian target kinerja utama daerah.

Dalam upaya pencapaian Visi tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) Misi. Penjabaran Misi Pembangunan Kabupaten Bogor selama lima tahun ke depan Tahun sebagai Berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik;
2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju;
3. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Berkeadilan;
4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

3.1 Tujuan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kabupaten Bogor, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor mempunyai tugas

pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan unsur pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan atas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja dengan semakin meningkatnya tuntutan serta harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor mengacu pada RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 yaitu “**Terwujudnya Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang berkualitas**”, dengan indikator yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD).

3.2 Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

Sasaran pembangunan daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Untuk mencapai tujuan di atas, maka terdapat 2 (dua) sasaran dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor yaitu pertama, meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan indikator kualitas perencanaan pembangunan daerah. Kedua yaitu, hasil riset dan inovasi yang implementatif dengan indikator yang pertama Persentase kebijakan hasil riset yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintah daerah dan indikator kedua tingkat capaian inovasi daerah. Tujuan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor berserta indikator kinerja sebagaimana dalam Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3. 1
Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR		SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN						KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, dan terintegrasi	Terwujudnya perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi yang berkualitas			1.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	Predikat	-	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
		1	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1	Persentase Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Poin	-	89	90	91	92	93	
				2.	Indeks Riset dan Inovasi Daerah	Predikat	-	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
		2	Hasil Riset dan Inovasi yang menjadi dasar kebijakan daerah	2.1	Persentase Kebijakan hasil riset dan inovasi yang menjadi dasar kebijakan	%	-	64.86	72.22	73.68	78.57	78.57	

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam pemcapaian tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pelaksanaannya. Arah kebijakan Menguraikan langkah konkrit pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah, yang sesuai dengan NSPK dan Kewenangan Perangkat Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan daerah, dalam menjalankan tugasnya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor mengacu pada NSPK yang sangat luas dan mencakup berbagai aspek. NSPK yang menjadi acuan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah berkaitan dengan Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Riset dan Inovasi Daerah (Rida).

Tabel 3. 2
Arah Kebijakan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KETERANGAN
1	Perencanaan Pembangunan Daerah	Menyempurnakan Tata Kelola Pemerintahan dengan Menjamin Pemerintahan yang Bersih dan Tanpa KKN	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan adaptif	
2	Riset dan Inovasi Daerah		Peningkatan kualitas kebijakan strategis berbasis riset dan inovasi	

3.4 Strategi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

Strategi pada Rencana Strategis (Renstra) merupakan pendekatan atau keseluruhan cara yang akan ditempuh oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam periode waktu 5 tahun. Strategis menjadi jembatan Perangkat Daerah untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan tujuan jangka panjang dan berkontribusi pada pencapaian visi, misi, dan tujuan dengan program serta kegiatan-kegiatan strategis Perangkat Daerah.

Strategi Pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan Pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan Langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dalam Menyusun strategi pengentasan kemiskinan yang lebih terarah, sistematis, dan terintegrasi dengan program Pembangunan daerah lainnya dibentuknya Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.

Dalam penyusunan RPKD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, pendekatan berbasis *good governance* akan menjadi prinsip utama. Transparansi, partisipasi Masyarakat, dan akuntabilitas menjadi factor penting dalam memastikan dampak nyata bagi Masyarakat miskin. Penyusunan RPKD merupakan Langkah strategis berbasis data, serta tata Kelola yang inklusif, diharapkan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Tabel 3. 3
 Penahapan Renstra Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

STRATEGIS DAERAH	STRATEGIS PD	ARAH KEBIJAKAN PD	2025	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Menyempurnakan tata kelola pemerintahan dengan menjamin pemerintahan yang bersih dan kkn	Menyempurnakan perencanaan pembangunan yang adaptif sesuai dengan prinsip <i>Good and Clean Governance</i>	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan adaptif	-	Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan	Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan	Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan	Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan Dokumen Tahunan dan Rancangan Teknokratik Perencanaan Pembangunan 5 Tahunan	Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 5 Tahunan dan Tahunan
		Peningkatan kualitas kebijakan strategis berbasis riset dan inovasi	-	Peningkatan kualitas kebijakan Strategis Pemerintah Daerah berbasis Riset dan Inovasi	Kolaborasi dan Pemanfaatan kualitas kebijakan Pemerintah Daerah berbasis Riset dan Inovasi	Peningkatan kualitas kebijakan berbasis Riset dan Inovasi melalui Pengembangan talenta	Penguatan Tata kelola berbasis Riset dan Inovasi yang efektif dan akuntabel	Peningkatan Tata kelola berbasis Riset dan Inovasi yang efektif dan akuntabel

Sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian permasalahan yang di hadapi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor antara lain:

1. Perencanaan Pembangunan belum berkualitas;
2. Hasil riset dan Inoavsi belum berkualitas;
3. Koordinasi kebijakan dan pengelolaan pembangunan daerah yang belum optimal;

Wilayah Provinsi Jawa Barat yang luas dan jumlah penduduk yang besar merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan daerah yang semakin kompleks. Birokrasi yang terkait dengan seperangkat regulasi juga dihadapkan dengan tuntutan perubahan yang cepat dan responsif terhadap pelayanan kepada masyarakat. Kolaborasi dan partisipasi akan menjadi keharusan dalam pengelolaan daerah seiring dengan meningkatnya pendidikan masyarakat. Kualitas tata kelola pemerintahan merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Permasalahan yang ditemukan dalam KLHS Kabupaten Bogor umumnya terkait dengan dampak pembangunan yang tidak sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, masalah-masalah tersebut meliputi:

a. Tekanan lingkungan hidup

Pertumbuhan penduduk dan pembangunan infrastruktur yang pesat di Kabupaten Bogor meningkatkan tekanan terhadap lingkungan. Hal ini menyebabkan konversi lahan hijau menjadi permukiman dan kawasan industri, yang pada gilirannya mengurangi fungsi ekologis lahan.

b. Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan

Pembangunan yang tidak terkendali seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran Air, Pencemaran Udara, dan Degradasi Lahan.

Pada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Bogor Tahun 2022-2052, terdapat indikasi arah kebijakan yang meliputi indikasi arahan bagi rencana adaptasi dan mitigasi

terhadap perubahan iklim. Rumusan kebijakan ini dampak negatif karena adanya perubahan kondisi lingkungan hidup yang diakibatkan oleh perubahan iklim.

Tabel 2. 3
Perumusan Permasalahan Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor

URAIAN	PERMASALAHAN
Terwujudnya perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi yang berkualitas	Perencanaan pembangunan belum berkualitas
	Hasil Riset dan Inovasi belum berkualitas
	Belum optimalnya capaian kinerja pemerintah daerah
Pelayanan prima tata kelola pemerintahan (<i>Good Governance</i>)	Koordinasi Kebijakan dan pengelolaan pembangunan daerah yang belum optimal

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang haarus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Dalam usaha mengembangkan pelayanan Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan analisa terhadap lingkungan didalam maupun diluar organisasi. Kondisi lingkungan ini dapat menggambarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terhadap pencapaian visi dan misi organisasi yang mengacu pada analisis sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 4
Perumusan Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi
Daerah Kabupaten Bogor

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	PROVINSI	
Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	Perencanaan pembangunan belum berkualitas	Koordinasi Kebijakan dan pengelolaan pembangunan daerah yang belum optimal	Perencana an Pembangu nan Berkelanj utan	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
	Hasil Riset dan Inovasi belum berkualitas	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Sumber Daya	Perencana an Pembangu nan Berkelanj utan	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Kualitas hasil riset dan inovasi
	Koordinasi Kebijakan dan pengelolaan pembangunan daerah yang belum optimal	Koordinasi Kebijakan dan pengelolaan pembangunan daerah yang belum optimal	Perencana an Pembangu nan Berkelanj utan	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja

BAB III

TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarki dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2025- 2029. Merujuk pada Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 adalah:

“Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang”

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor dimaksud adalah:

1. **Kabupaten Bogor** adalah sebuah kabupaten di bagian Barat, Provinsi Jawa Barat. Secara administratif, Kabupaten Bogor berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi di sebelah Utara; Kabupaten Karawang di sebelah Timur, Kabupaten Cianjur di sebelah Tenggara, Kabupaten Sukabumi di sebelah Selatan, serta Kabupaten Lebak Provinsi Banten di sebelah Barat. Kabupaten Bogor memiliki semboyan **“Prayoga, Tohaga, Sayaga” - “Kuta Udaya Wangsa”**. Prayoga artinya Utama, Tohaga artinya Kokoh dan Kuat, Sayaga artinya Sedia atau Siap Siaga, yang memiliki makna pendirian dan perjuangan masyarakat Kabupaten Bogor hendaknya selalu mengutamakan kekokohan, kuat pada pendirian dan perjuangannya serta selalu siap siaga menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai cita-cita, mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sementara Kuta artinya Kota, Udaya artinya Fajar atau Kebangkitan, Wangsa artinya Bangsa atau Suku Bangsa, yang memiliki makna bahwa Kabupaten Bogor dengan dukungan masyarakatnya akan menjadi pusat kebangkitan bagi perjuangan pembangunan untuk memperoleh kemajuan dan kemakmuran bangsa.
2. **Istimewa**, singkatan dari Inspiratif, Merakyat dan Wibawa, yang dijelaskan sebagai berikut:

- **Inspiratif** adalah kepemimpinan dari Bupati dan Wakil Bupati Bogor harus dapat menjadi teladan bagi bawahannya serta memberikan inspirasi kepada masyarakat yang dipimpinnya.
- **Merakyat** adalah sosok Bupati dan Wakil Bupati harus menjadi panutan dan harus mampu menyelesaikan segala bentuk masalah dengan sikap dan perilaku merakyat, dalam arti ramah kepada masyarakat dengan mengedepankan sikap profesionalisme dan memberikan pelayanan terbaik yang memuaskan masyarakat.
- **Wibawa** adalah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati harus mampu mewujudkan kewibawaan Kabupaten Bogor kepada seluruh masyarakat dan pemerintahan lainnya.

Dengan demikian, **Istimewa** adalah kondisi dengan kekhasan tertentu yang merupakan aktualisasi dari kerja konkrit Pemerintah Kabupaten Bogor yang Inspiratif, Merakyat dan Berwibawa, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor untuk menjadi masyarakat yang terbaik.

3. **Gemilang**, merupakan perwujudan kinerja pembangunan daerah selama lima tahun, yang menunjukkan peningkatan (kemajuan) yang optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ditandai dengan pelampauan dalam pencapaian target kinerja utama daerah.

Dalam upaya pencapaian Visi tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) Misi. Penjabaran Misi Pembangunan Kabupaten Bogor selama lima tahun ke depan Tahun sebagai Berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik;
2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju;
3. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Berkeadilan;
4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

3.1 Tujuan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kabupaten Bogor, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor mempunyai tugas

pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan unsur pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan atas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja dengan semakin meningkatnya tuntutan serta harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor mengacu pada RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 yaitu “**Terwujudnya Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang berkualitas**”, dengan indikator yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD).

3.2 Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

Sasaran pembangunan daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Untuk mencapai tujuan di atas, maka terdapat 2 (dua) sasaran dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor yaitu pertama, meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan indikator kualitas perencanaan pembangunan daerah. Kedua yaitu, hasil riset dan inovasi yang implementatif dengan indikator yang pertama Persentase kebijakan hasil riset yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintah daerah dan indikator kedua tingkat capaian inovasi daerah. Tujuan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor berserta indikator kinerja sebagaimana dalam Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3. 1
Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR		SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN						KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, dan terintegrasi	Terwujudnya perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi yang berkualitas			1.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	Predikat	-	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
		1	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1	Persentase Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Poin	-	89	90	91	92	93	
				2.	Indeks Riset dan Inovasi Daerah	Predikat	-	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
		2	Hasil Riset dan Inovasi yang menjadi dasar kebijakan daerah	2.1	Persentase Kebijakan hasil riset dan inovasi yang menjadi dasar kebijakan	%	-	64.86	72.22	73.68	78.57	78.57	

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam pemcapaian tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pelaksanaannya. Arah kebijakan Menguraikan langkah konkrit pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah, yang sesuai dengan NSPK dan Kewenangan Perangkat Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan daerah, dalam menjalankan tugasnya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor mengacu pada NSPK yang sangat luas dan mencakup berbagai aspek. NSPK yang menjadi acuan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah berkaitan dengan Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Riset dan Inovasi Daerah (Rida).

Tabel 3. 2
Arah Kebijakan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KETERANGAN
1	Perencanaan Pembangunan Daerah	Menyempurnakan Tata Kelola Pemerintahan dengan Menjamin Pemerintahan yang Bersih dan Tanpa KKN	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan adaptif	
2	Riset dan Inovasi Daerah		Peningkatan kualitas kebijakan strategis berbasis riset dan inovasi	

3.4 Strategi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

Strategi pada Rencana Strategis (Renstra) merupakan pendekatan atau keseluruhan cara yang akan ditempuh oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam periode waktu 5 tahun. Strategis menjadi jembatan Perangkat Daerah untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan tujuan jangka panjang dan berkontribusi pada pencapaian visi, misi, dan tujuan dengan program serta kegiatan-kegiatan strategis Perangkat Daerah.

Strategi Pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan Pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan Langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dalam Menyusun strategi pengentasan kemiskinan yang lebih terarah, sistematis, dan terintegrasi dengan program Pembangunan daerah lainnya dibentuknya Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.

Dalam penyusunan RPKD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, pendekatan berbasis *good governance* akan menjadi prinsip utama. Transparansi, partisipasi Masyarakat, dan akuntabilitas menjadi factor penting dalam memastikan dampak nyata bagi Masyarakat miskin. Penyusunan RPKD merupakan Langkah strategis berbasis data, serta tata Kelola yang inklusif, diharapkan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Tabel 3. 3
Penahapan Renstra Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

STRATEGIS DAERAH	STRATEGIS PD	ARAH KEBIJAKAN PD	2025	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Menyempurnakan tata kelola pemerintahan dengan menjamin pemerintahan yang bersih dan kkn	Menyempurnakan perencanaan pembangunan yang adaptif sesuai dengan prinsip <i>Good and Clean Governance</i>	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan adaptif	-	Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan	Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan	Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan	Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan Dokumen Tahunan dan Rancangan Teknokratik Perencanaan Pembangunan 5 Tahunan	Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 5 Tahunan dan Tahunan
		Peningkatan kualitas kebijakan strategis berbasis riset dan inovasi	-	Peningkatan kualitas kebijakan Strategis Pemerintah Daerah berbasis Riset dan Inovasi	Kolaborasi dan Pemanfaatan kualitas kebijakan Pemerintah Daerah berbasis Riset dan Inovasi	Peningkatan kualitas kebijakan berbasis Riset dan Inovasi melalui Pengembangan talenta	Penguatan Tata kelola berbasis Riset dan Inovasi yang efektif dan akuntabel	Peningkatan Tata kelola berbasis Riset dan Inovasi yang efektif dan akuntabel

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN UNSUR PERENCANAAN SERTA RISET DAN INOVASI DAERAH

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029

Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor adalah turunan operasional dari strategi yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis.

Program merupakan penjabaran dari strategi yang ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor, berisi sekumpulan kegiatan yang sistematis dan terintegrasi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih luas. Kegiatan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang lebih spesifik dan terukur, merupakan bagian dari suatu program, yang dirancang untuk menghasilkan output tertentu dalam rangka mencapai tujuan program Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor. Sedangkan Sub Kegiatan adalah rincian paling operasional dan spesifik dari suatu kegiatan. Ini adalah unit terkecil yang menguraikan Langkah-langkah detail yang harus dilakukan untuk mencapai output kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor.

Pada program dan kegiatan terdapat indikator kinerja yang merupakan tolak ukur keberhasilan baik kualitatif maupun kuantitatif. Indikator kinerja secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor. Penjabaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan indikator Kinerja, target kinerja serta kebutuhan anggaran dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1
Tabel Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik yang akuntable terintegrasi	Terwujudnya perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah		Nilai rata-rata dari Persentase Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD dan Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	100	2,734,261,173	100	2,109,618,831	100	4,682,851,411	100	5,403,061,078	100	6,982,316,671	100	8,093,114,126	
				Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah dengan Ketentuan yang berlaku	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100	1,458,724,362	100	1,126,628,606	100	2,575,880,444	100	2,980,044,466	100	4,141,847,567	100	4,888,674,656	
				Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	3	253,812,873	2	235,819,046	2	375,000,000	2	461,250,000	3	660,437,500	3	874,503,125	
				Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1	463,653,342	1	304,322,812	1	474,783,578	1	576,001,115	1	792,401,282	1	926,261,475	
				Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik	1	36,621,399	1	40,784,829	1	92,000,000	1	105,800,000	1	121,670,000	2	139,920,500	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	27,592,939	1	21,884,319	1	115,000,000	1	132,250,000	1	152,087,500	1	174,900,625	
				Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1	283,312,692	1	285,218,991	1	390,000,000	1	493,500,000	1	912,525,000	2	949,403,750	
				Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	40	115,755,499	40	85,578,761	40	287,500,000	40	330,625,000	40	380,218,750	40	437,251,563	
				Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	3	277,975,618	2	153,019,848	2	841,596,866	2	880,618,351	3	1,122,507,535	3	1,386,433,619	
				Terpenuhinya Kualitas Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai ketentuan	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	90	971,481,428	100	718,202,301	100	1,067,712,836	100	1,227,869,761	100	1,412,050,225	100	1,623,857,759	
				Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2	809,506,388	2	598,467,469	2	690,000,000	2	793,500,000	2	912,525,000	2	1,049,403,750	
				Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	511	161,975,040	511	119,734,832	511	377,712,836	511	434,369,761	511	499,525,225	511	574,454,009	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
				Meningkatnya Ketercapaian Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	Tingkat Ketercapaian IKU Perangkat Daerah dan IKU Pemerintah Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	80	189,849,526	81	160,357,603	82	579,258,131	83	666,146,851	84	766,068,879	85	880,979,211	
				Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	2	145,562,694	2	107,615,935	2	241,357,539	2	277,561,170	2	319,195,346	2	367,074,647	
				Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2	44,286,832	2	52,741,668	2	337,900,592	2	388,585,681	2	446,873,533	2	513,904,563	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemanfaatan Pengelolaan Data Pada SIPD	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	60	114,205,857	100	104,430,321	100	460,000,000	100	529,000,000	100	608,350,000	100	699,602,500	
				Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	3	114,205,857	3	104,430,321	3	460,000,000	3	529,000,000	3	608,350,000	3	699,602,500	
			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		1. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	80	10,375,633,342	81	4,623,051,356	82	7,876,786,334	83	9,088,214,407	84	10,417,690,573	85	12,169,126,027	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		2. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		80		81		82		83		84		85		
			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		3. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		80		81		82		83		84		85		
				Terarahnya Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai Rata-rata Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	82	2,039,844,671	83	1,436,341,744	84	2,538,778,314	85	2,919,505,185	86	3,433,674,965	87	3,946,508,080	
				Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (JPD, JMD dan RKPD)	3	211,204,516	2	300,580,013	2	281,278,314	2	263,687,500	3	365,881,215	3	461,045,267	
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3	48,839,218	2	62,499,985	2	201,250,000	2	231,437,500	3	266,153,125	3	306,076,094	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5	35,814,345	5	67,499,801	5	115,000,000	5	132,250,000	5	152,087,500	5	174,900,625	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	3	68,741,070	2	76,443,250	2	316,250,000	2	308,380,185	3	418,240,625	3	480,976,719	
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (JPD, JMD dan RKPD)	3	835,013,107	2	214,383,705	2	316,250,000	2	363,687,500	3	418,240,625	3	480,976,719	
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3	81,323,841	3	84,989,587	3	201,250,000	3	231,437,500	3	266,153,125	3	306,076,094	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5	81,689,149	5	129,953,278	5	488,750,000	5	562,062,500	5	646,371,875	5	743,327,656	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3	677,219,425	3	499,992,125	3	718,750,000	3	826,562,500	3	900,546,875	3	993,128,906	
				Terarahnya Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Nilai Rata-rata Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	82	1,451,391,145	83	1,130,444,684	84	1,643,008,020	85	1,904,459,222	86	2,135,128,108	87	2,550,897,322	
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (JPD, JMD dan RKPD)	3	111,302,519	2	225,448,441	2	330,762,032	2	380,376,336	3	437,432,787	3	503,047,705	
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3	38,542,048	2	48,998,517	2	53,924,737	2	62,013,448	3	71,315,465	3	82,012,785	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5	41,091,229	5	80,998,711	5	106,835,055	5	122,860,313	5	141,289,361	5	162,482,765	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	2	299,519,165	2	303,999,606	2	475,286,196	2	561,579,125	2	710,815,993	2	774,938,391	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (JPD, JMD dan RKPD)	3	216,534,145	2	284,000,000	2	239,775,000	2	275,741,250	3	317,102,438	3	364,667,803	
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3	43,836,235	2	52,000,000	2	150,075,000	2	172,586,250	3	198,474,188	3	228,245,316	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5	46,656,075	5	53,999,675	5	76,475,000	5	87,946,250	5	101,138,188	5	116,308,916	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	2	653,909,729	2	80,999,734	2	209,875,000	2	241,356,250	2	277,559,688	2	319,193,641	
				Terarahnya Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai Rata-rata Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	82	6,884,397,527	83	2,056,264,928	84	3,695,000,000	85	4,264,250,000	86	4,848,887,500	87	5,671,720,625	
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (JPD, JMD dan RKPD)	5	2,073,795,747	5	132,674,575	5	460,000,000	5	529,000,000	5	608,350,000	5	699,602,500	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4	215,290,327	4	215,290,102	4	287,500,000	4	330,625,000	4	380,218,750	4	437,251,563	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4	62,147,445	4	62,140,313	4	57,500,000	4	66,125,000	4	76,043,750	4	87,450,313	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	3	3,278,878,111	3	398,603,029	3	690,000,000	3	793,500,000	3	912,525,000	3	1,049,403,750	
				Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (JPD, JMD dan RKPD)	4	139,975,415	4	238,460,220	4	601,500,000	4	806,725,000	4	807,733,750	4	966,893,813	
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1	65,036,693	1	65,035,261	1	460,000,000	1	529,000,000	1	608,350,000	1	699,602,500	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4	70,576,673	4	71,794,591	4	506,000,000	4	581,900,000	4	619,185,000	4	769,562,750	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	2	978,697,116	2	872,266,837	2	632,500,000	2	627,375,000	2	836,481,250	2	961,953,438	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai AKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BB	24,891,900,582	BB	27,892,276,808	BB	31,466,875,080	BB	36,306,393,920	BB	41,617,501,601	BB	48,614,289,166	
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	100	694,338,681	100	826,898,910	100	1,450,933,747	100	1,293,573,811	100	1,557,609,883	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	182,364,503	8	445,226,412	8	332,948,071	8	482,890,282	8	540,323,824	8	506,372,398	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	22,669,531	1	22,669,530	1	44,175,259	1	50,801,548	1	58,421,780	1	67,185,048	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	14,631,299	1	14,631,299	1	31,017,787	1	35,670,455	1	41,021,024	1	47,174,177	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	15,660,047	1	15,660,047	1	42,985,008	1	49,432,759	1	56,847,673	1	65,374,824	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	11,914,907	1	11,914,907	1	52,673,759	1	60,574,823	1	69,661,047	1	80,110,204	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	22,662,034	5	32,662,034	5	103,253,732	5	318,741,792	5	236,553,061	5	357,036,020	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	113,880,927	5	143,880,927	5	207,288,990	5	438,382,339	5	274,139,690	5	415,260,643	
				Tersedianya Laporan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Laporan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	7,693,525	1	7,693,525	1	12,556,304	1	14,439,749	1	16,605,712	1	19,096,568	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan PD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang sesuai ketentuan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	18,332,338,710	100	19,768,125,141	100	20,456,412,442	100	20,691,694,995	100	25,732,269,930	100	31,568,751,801	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	18,173,1688,454	14	19,508,449,254	14	20,221,195,426	14	20,421,195,426	14	25,421,195,426	14	31,211,016,122	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	28,752,220	12	28,468,809	12	47,001,880	12	54,052,162	12	62,159,986	12	71,483,984	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	15,550,462	1	15,562,035	1	29,051,768	1	33,409,533	1	38,420,963	1	44,184,108	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	16,126,276	1	16,982,945	1	26,430,158	1	30,394,682	1	34,953,884	1	40,196,966	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18	98,741,298	18	198,662,098	18	132,733,210	18	152,643,192	18	175,539,671	18	201,870,621	
				Pengelolaan Aset yang Berkualitas	Persentase Aset yang tercatat sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	24,076,633	100	24,076,633	100	51,064,002	100	58,723,602	100	67,532,143	100	77,661,964	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	5,592,792	2	5,592,792	2	17,940,000	2	20,631,000	2	23,725,650	2	27,284,498	
				Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4	5,680,934	4	5,680,934	4	14,467,000	4	16,637,050	4	19,132,608	4	22,002,499	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	12,802,907	2	12,802,907	2	18,657,002	2	21,455,552	2	24,673,885	2	28,374,968	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kepegawaian Perangkat Daerah yang berkualitas	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	413,783,533	100	443,783,533	100	696,774,303	100	801,290,448	100	921,484,016	100	1,059,706,619	
				Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1160	28,142,553	1160	28,142,553	1160	32,363,300	1160	37,217,795	1160	42,800,464	1160	49,220,534	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3	23,558,363	3	83,558,363	3	140,916,648	3	162,054,146	3	186,362,268	3	214,316,608	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	17,238,996	12	17,238,996	12	32,871,348	12	37,802,050	12	43,472,358	12	49,993,212	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	54,945	12	-	12	38,692,403	12	44,496,264	12	51,170,703	12	58,846,309	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	29,529,332	4	29,584,277	4	120,306,585	4	138,352,573	4	159,105,459	4	182,971,278	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9	149,540,305	9	149,540,305	9	53,010,627	9	60,962,221	9	70,106,554	9	80,622,537	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	135	27,004,056	135	27,004,056	135	40,049,856	135	46,057,335	135	52,965,935	135	60,910,825	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26	138,714,983	26	108,714,983	26	238,563,535	26	274,348,065	26	315,500,275	26	362,825,316	
				Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Tingkat pemenuhan sarana operasional perangkat	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80	1,882,236,703	80	1,745,102,127	80	2,522,180,980	82	2,900,508,129	82	3,335,584,347	82	3,835,921,998	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
					daerah sesuai kebutuhan														
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	143,458,763	4	143,458,763	4	100,200,558	4	115,230,643	4	132,515,239	4	152,392,525	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	809,463,393	2	609,463,393	2	214,587,025	2	246,775,079	2	283,791,340	2	326,360,042	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2	278,625,158	2	231,490,600	2	491,686,016	2	565,438,918	2	650,254,756	2	747,792,969	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4	143,213,427	4	143,213,427	4	720,551,881	4	828,634,663	4	952,929,863	4	1,095,869,342	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4	105,215,134	4	105,215,116	4	177,569,899	4	204,205,385	4	234,836,192	4	270,061,620	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	43,902,244	12	43,902,244	12	187,778,525	12	215,945,304	12	248,337,099	12	285,587,664	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	289,136,108	12	399,136,108	12	517,965,290	12	595,660,084	12	685,009,096	12	787,760,460	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	20,518,516.5	4	20,518,517	4	32,450,358	4	37,317,912	4	42,915,599	4	49,352,939	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	48,703,959	1	48,703,959	1	79,391,428	1	91,300,142	1	104,995,163	1	120,744,437	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
				Meningkatnya pemenuhan jasa penunang urusan pemerintah daerah	Pengelolaan barang milik daerah unsur penunjang perangkat daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90	868,939,514	90	1,306,871,093	90	2,103,589,577	92	2,419,128,013	92	2,781,997,214	92	3,199,296,796	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	37,068,228	1	50,000,000	1	792,127,174	1	910,946,250	1	1,047,588,187	1	1,204,726,415	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7	585,713,700	7	658,806,238	7	747,500,000	7	859,625,000	7	988,568,750	7	1,136,854,063	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	1	10,030,616	1	260,030,616	1	362,317,688	1	416,665,341	1	479,165,142	1	551,039,914	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	2,972,025	1	134,879,294	1	45,811,655	1	52,683,404	1	60,585,914	1	69,673,801	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10	132,027,840	10	102,027,840	10	52,953,173	10	60,896,148	10	70,030,571	10	80,535,156	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5	101,127,105	5	101,127,105	5	102,879,887	5	118,311,870	5	136,058,650	5	156,467,448	
				meningkatnya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai ketentuan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1,858,287,936	100	2,211,287,936	100	2,579,349,937	100	3,166,252,428	100	3,411,190,292	100	3,922,868,835	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	5,600,000	12	8,600,000	12	11,780,139	12	13,547,160	12	15,579,234	12	17,916,118	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	811,449,520	12	861,449,520	12	1,026,548,237	12	1,180,530,473	12	1,357,610,044	12	1,561,251,550	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	10,235,088	1	10,235,088	1	40,250,575	1	46,288,161	1	53,231,385	1	61,216,093	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	1,031,003,328	12	1,331,003,328	12	1,500,770,986	12	1,925,886,634	12	1,984,769,629	12	2,282,485,074	
				Berfungsinya barang milik daerah dengan baik	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90	1,120,760,780	90	1,698,691,664	90	2,230,604,930	92	4,817,862,557	92	4,073,869,848	92	3,392,471,268	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20	166,995,000	20	302,214,214	20	347,546,347	20	399,678,298	20	459,630,043	20	459,630,043	
				Pemeliharaan Mebel	Tersedianya pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-		34,424,185		39,587,813		45,525,985		52,354,883		52,354,883	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	121	130,602,600	121	142,935,634	121	164,375,980	121	189,032,376	121	217,387,233	121	217,387,233	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	489,210,633	1	950,915,636	1	1,370,662,496	1	3,828,928,760	1	2,936,595,980	1	2,255,197,400	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70	44,955,000	70	198,403,732	70	228,164,291	70	262,388,935	70	301,747,275	70	301,747,275	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	288,997,547	2	69,798,263	2	80,268,003	2	92,308,203	2	106,154,434	2	106,154,434	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Hasil Riset dan Inovasi yang Menjadi dasar Kebijakan Daerah	Rekomenda si Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi yang dihasilkan		Rekomendasi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi yang dihasilkan	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	7	3,963,362,738	7	3,390,895,139	7	3,753,221,259	7	4,330,456,366	7	4,963,940,378	7	5,798,484,379	
				Terpenuhinya bahan kebijakan perencanaan, penelitian, pengembanga n, pengkajian dan penerapan	Persentase bahan kebijakan perencanaan, penelitian, pengmbangan, pengkajian dan penerapan	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	100	3,148,922,826	100	1,397,440,080	100	2,474,728,595	100	2,813,910,698	100	3,240,883,828	100	3,701,969,347	
				Persentase hasil evaluasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan yang memenuhi standar	Predikat hasil inovasi yang menjadi dasar perumusan kebijakan penyelenggaraa n Pemerintah Daerah														
					karya tulis ilmiah terindeks global yang terdaftar														
				Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan , pengkajian dan penerapan	Laporan pementauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	-	-	-	-	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	
				Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	9	3,148,922,826	7	1,397,440,080	7	1,974,728,595	7	2,313,910,698	7	2,740,883,828	7	3,201,969,347	
				Terlaksananya fasilitas dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan , pengkajian dan penerapan	Jumlah laporan fasilitas dan poembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan pengkajian, dan penerapan	-	-	-	-	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	
				Terselenggaran ya rapat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan , pengkajian dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	-	-	-	-	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
				Terlaksananya bimbingan teknis dan supervise di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervise di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan kerja sama Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	Bimbingan Teknis dan supervise di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan kerja sama Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	-	-	-	-	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	
				Terlaksananya koordinasi sitem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	-	-	-	-	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	
				Meningkatnya Invensi dan Inovasi Perangkat Daerah yang bermanfaat	Nilai Predikat Inovasi dan Inovasi Daerah	Invensi dan Inovasi	Sangat Inovatif	814,439,912	Sangat Inovatif	1,993,455,059	Sangat Inovatif	1,278,492,664	Sangat Inovatif	1,516,545,668	Sangat Inovatif	1,723,056,550	Sangat Inovatif	2,096,515,032	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	1	102,521,342	1	99,996,828	1	251,591,114	1	289,329,781	1	232,729,249	1	382,638,636	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	1	100,387,267	1	999,000,273	1	143,098,481	1	164,563,253	1	189,247,742	1	217,634,903	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	1	28,227,284	1	119,999,959	1	72,558,856.70	1	83,442,685	1	95,959,088	1	110,352,951	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	1	45,543,410	1	99,999,994	1	134,548,945	1	154,731,287	1	177,940,980	1	204,632,127	
				Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/or ganisasi penelitian lainnya di daerah	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/or ganisasi penelitian lainnya di daerah	1	79,286,627	1	124,999,745	1	59,799,654	1	68,769,602	1	79,085,042	1	90,947,799	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	1	12,235,294	1	99,999,609	1	212,749,865	1	244,662,345	1	281,361,697	1	323,565,952	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1	446,238,688	1	449,458,651	1	404,145,748	1	511,046,715	1	666,732,752	1	766,742,664	

4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor

Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan hingga target pencapaian menjadi jelas dan terukur. Indikator Kinerja Utama (IKU) dirumuskan sebagai *critical success factor* terhadap pencapaian sasaran kinerja pemerintah daerah pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 sehingga terbangun korelasi yang jelas antara kinerja pemerintah daerah dengan kinerja perangkat daerah. Adapun kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4. 2
Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET (TAHUN)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Tujuan							
1.1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	Predikat	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	Indeks Riset dan Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	Sasaran							
1.1.1	Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	%	88	89	90	91	92	93
1.2.1	Persentase hasil riset dan inovasi yang menjadi dasar Kebijakan Daerah	%	53.85	64.86	72.22	73.68	78.57	78.57

Tabel 4. 3
Indikator Kinerja Kunci Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	27,349,827,373	BB	24,891,900,582	BB	27,892,276,808	BB	31,466,875,080	BB	36,306,393,920	BB	41,617,501,601	BB	48,614,289,166	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang Berkualitas	%	BB	41,883,500	100	91,476,773	100	694,338,681	100	826,898,910	100	1,450,933,747	100	1,293,573,811	100	1,557,609,883	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	118,684,675	8	182,364,503	8	445,226,412	8	332,948,071	8	482,890,282	8	540,323,824	8	506,372,398	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	1	18,309,000	1	22,669,531	1	22,669,530	1	44,175,259	1	50,801,548	1	58,421,780	1	67,185,048	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen	1	17,354,000	1	14,631,299	1	14,631,299	1	31,017,787	1	35,670,455	1	41,021,024	1	47,174,177	
Tersedianya Dokumen DPA- -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen	1	20,609,000	1	15,660,047	1	15,660,047	1	42,985,008	1	49,432,759	1	56,847,673	1	65,374,824	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	16,533,100	1	11,914,907	1	11,914,907	1	52,673,759	1	60,574,823	1	69,661,047	1	80,110,204	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	85,143,725	5	22,662,034	5	32,662,034	5	103,253,732	5	318,741,792	5	236,553,061	5	357,036,020	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	141,850,000	5	113,880,927	5	143,880,927	5	207,288,990	5	438,382,339	5	274,139,690	5	415,260,643	
Tersedianya Laporan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Laporan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	Laporan	-	-	1	7,693,525	1	7,693,525	1	12,556,304	1	14,439,749	1	16,605,712	1	19,096,568	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan PD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang sesuai ketentuan	%	100	18,367,134,990	100	18,332,338,710	100	19,768,125,141	100	20,456,412,442	100	20,691,694,995	100	25,732,269,930	100	31,568,751,801	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	14	17,204,815,984	14	18,173,168,454	14	19,508,449,254	14	20,221,195,426	14	20,421,195,426	14	25,421,195,426	14	31,211,016,122	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	27,476,700	12	28,752,220	12	28,468,809	12	47,001,880	12	54,052,162	12	62,159,986	12	71,483,984	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	7,233,070	1	15,550,462	1	15,562,035	1	29,051,768	1	33,409,533	1	38,420,963	1	44,184,108	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	22,695,500	1	16,126,276	1	16,982,945	1	26,430,158	1	30,394,682	1	34,953,884	1	40,196,966	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	25,682,400	2	98,741,298	18	198,662,098	18	132,733,210	18	152,643,192	18	175,539,671	18	201,870,621	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Aset yang tercatat sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah	%	100	29,944,760	100	24,076,633	100	24,076,633	100	51,064,002	100	58,723,602	100	67,532,143	100	77,661,964	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	7,224,700	2	5,592,792	2	5,592,792	2	17,940,000	2	20,631,000	2	23,725,650	2	27,284,498	
Tersedianya Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	1	8,764,400	1	5,680,934	4	5,680,934	4	14,467,000	4	16,637,050	4	19,132,608	4	22,002,499	
Tersedianya Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	7,233,500	4	12,802,907	2	12,802,907	2	18,657,002	2	21,455,552	2	24,673,885	2	28,374,968	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah yang berkualitas	%	100	709,212,180	100	413,783,533	100	443,783,533	100	696,774,303	100	801,290,448	100	921,484,016	100	1,059,706,619	
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	4	-	160	28,142,553	1160	28,142,553	1160	32,363,300	1160	37,217,795	1160	42,800,464	1160	49,220,534	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	-	3	23,558,363	3	83,558,363	3	140,916,648	3	162,054,146	3	186,362,268	3	214,316,608	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	-	12	17,238,996	12	17,238,996	12	32,871,348	12	37,802,050	12	43,472,358	12	49,993,212	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	15,400,100	12	54,945	12	-	12	38,692,403	12	44,496,264	12	51,170,703	12	58,846,309	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	48,012,500	12	29,529,332	4	29,584,277	4	120,306,585	4	138,352,573	4	159,105,459	4	182,971,278	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	105	123,335,100	10	149,540,305	9	149,540,305	9	53,010,627	9	60,962,221	9	70,106,554	9	80,622,537	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	135	15,162,900	135	27,004,056	135	27,004,056	135	40,049,856	135	46,057,335	135	52,965,935	135	60,910,825	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	110	507,301,580	27	138,714,983	26	108,714,983	26	238,563,535	26	274,348,065	26	315,500,275	26	362,825,316	
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Tingkat pemenuhan sarana operasional perangkat daerah sesuai kebutuhan	%	100	1,955,680,227	100	1,882,236,703		1,745,102,127	80	2,522,180,980	82	2,900,508,129	82	3,335,584,347	82	3,835,921,998	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8	115,577,000	4	143,458,763		143,458,763	4	100,200,558	4	115,230,643	4	132,515,239	4	152,392,525	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	716,885,000	2	809,463,393		609,463,393	2	214,587,025	2	246,775,079	2	283,791,340	2	326,360,042	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	148,666,500	5	278,625,158		231,490,600	2	491,686,016	2	565,438,918	2	650,254,756	2	747,792,969	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	88,414,600	12	143,213,427		143,213,427	4	720,551,881	4	828,634,663	4	952,929,863	4	1,095,869,342	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	162,349,800	4	105,215,134		105,215,116	4	177,569,899	4	204,205,385	4	234,836,192	4	270,061,620	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	7350	57,330,000	12	43,902,244		43,902,244	12	187,778,525	12	215,945,304	12	248,337,099	12	285,587,664	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	509	505,934,877	450	289,136,108		399,136,108	12	517,965,290	12	595,660,084	12	685,009,096	12	787,760,460	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	24,027,000	12	20,518,517		20,518,517	4	32,450,358	4	37,317,912	4	42,915,599	4	49,352,939	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	136,495,450	1	48,703,959		48,703,959	1	79,391,428	1	91,300,142	1	104,995,163	1	120,744,437	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Meningkatnya pemenuhan jasa penunang urusan pemerintah daerah	Pengelolaan barang milik daerah unsur penunjang perangkat daerah	%	100	900,965,000	100	868,939,514		1,306,871,093	90	2,103,589,577	92	2,419,128,013	92	2,781,997,214	92	3,199,296,796	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	-	56	37,068,228		50,000,000	1	792,127,174	1	910,946,250	1	1,047,588,187	1	1,204,726,415	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-	2	585,713,700		658,806,238	7	747,500,000	7	859,625,000	7	988,568,750	7	1,136,854,063	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	-	12	10,030,616		260,030,616	1	362,317,688	1	416,665,341	1	479,165,142	1	551,039,914	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	13	188,160,000	1	2,972,025		134,879,294	1	45,811,655	1	52,683,404	1	60,585,914	1	69,673,801	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	712,805,000	4	132,027,840		102,027,840	10	52,953,173	10	60,896,148	10	70,030,571	10	80,535,156	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	11	101,127,105		101,127,105	5	102,879,887	5	118,311,870	5	136,058,650	5	156,467,448	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
meningkatkan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai ketentuan	%	100	1,867,624,280	100	1,858,287,936	100	2,211,287,936	100	2,579,349,937	100	3,166,252,428	100	3,411,190,292	100	3,922,868,835	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	800	5,600,000	560	5,600,000	12	8,600,000	12	11,780,139	12	13,547,160	12	15,579,234	12	17,916,118	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	782,982,830	12	811,449,520	12	861,449,520	12	1,026,548,237	12	1,180,530,473	12	1,357,610,044	12	1,561,251,550	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	-	1	10,235,088	1	10,235,088	1	40,250,575	1	46,288,161	1	53,231,385	1	61,216,093	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1,079,041,450	12	1,031,003,328	12	1,331,003,328	12	1,500,770,986	12	1,925,886,634	12	1,984,769,629	12	2,282,485,074	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Berfungsinya barang milik daerah dengan baik	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	%	6	3,477,382,436	100	1,361,694,780	90	1,698,691,664	90	2,230,604,930	92	4,817,862,557	92	4,073,869,848	92	3,392,471,268	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	25	235,517,606	25	166,995,000	20	302,214,214	20	347,546,347	20	399,678,298	20	459,630,043	20	459,630,043	
Tersedianya pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	-	-	29,934,000		34,424,185		39,587,813		45,525,985		52,354,883		52,354,883	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	129		122	100,602,600	121	142,935,634	121	164,375,980	121	189,032,376	121	217,387,233	121	217,387,233	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	2,956,879,330	3	689,210,633	1	950,915,636	1	1,370,662,496	1	3,828,928,760	1	2,936,595,980	1	2,255,197,400	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	60	38,911,700	54	85,955,000	70	198,403,732	70	228,164,291	70	262,388,935	70	301,747,275	70	301,747,275	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	246,073,800	1	288,997,547	2	69,798,263	2	80,268,003	2	92,308,203	2	106,154,434	2	106,154,434	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH																	
Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Rata-rata dari persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD dan Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	100	3,237,358,351	100	1,277,331,532	100	2,109,618,831	100	4,682,851,411	100	5,403,061,078	100	6,982,316,671	100	8,093,114,126	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								1,126,628,606	100	2,575,880,444	100	2,980,044,466	100	4,141,847,567	100	4,888,674,656	
Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah dengan Ketentuan yang berlaku	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	100	2,394,111,916	100	1,458,724,362	100	235,819,046	2	375,000,000	2	461,250,000	3	660,437,500	3	874,503,125	
Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Awal Rancangan Teknokratik)	Dokumen	2	585,724,300	3	253,812,873	2	304,322,812	1	474,783,578	1	576,001,115	1	792,401,282	1	926,261,475	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen	6	474,651,268	1	463,653,342	1	40,784,829	1	92,000,000	1	105,800,000	1	121,670,000	2	139,920,500	
Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	37,170,500	1	36,621,399	1	21,884,319	1	115,000,000	1	132,250,000	1	152,087,500	1	174,900,625	
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	72	48,455,500	1	27,592,939	1	285,218,991	1	390,000,000	1	493,500,000	1	912,525,000	2	949,403,750	
Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	2	453,811,234	1	283,312,692	1	40,784,829	1	92,000,000	1	105,800,000	1	121,670,000	2	139,920,500	
Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	990	147,371,300	40	115,755,499	40	85,578,761	40	287,500,000	40	330,625,000	40	380,218,750	40	437,251,563	
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RK PD)	Dokumen	4	646,927,814	3	277,975,618	2	153,019,848	2	841,596,866	2	880,618,351	3	1,122,507,535	3	1,386,433,619	
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah																	
Terpenuhinya Kualitas Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai ketentuan	%	100	341,918,025	90	971,481,428	100	718,202,301	100	1,067,712,836	100	1,227,869,761	100	1,412,050,225	100	1,623,857,759	
Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	-		2	809,506,388	2	598,467,469	2	690,000,000	2	793,500,000	2	912,525,000	2	1,049,403,750	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	554	341,918,025	511	161,975,040	511	119,734,832	511	377,712,836	511	434,369,761	511	499,525,225	511	574,454,009	
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah																	
Meningkatnya Ketercapaian Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	Tingkat Ketercapaian IKU Perangkat Daerah dan IKU Pemerintah Daerah	%	40	317,146,626	80	189,849,526	81	160,357,603	82	579,258,131	83	666,146,851	84	766,068,879	85	880,979,211	
Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	2	248,394,826	2	145,562,694	2	107,615,935	2	241,357,539	2	277,561,170	2	319,195,346	2	367,074,647	
Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	2	68,751,800	2	44,286,832	2	52,741,668	2	337,900,592	2	388,585,681	2	446,873,533	2	513,904,563	
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemanfaatan Pengelolaan Data Pada SIPD	%	60	184,171,784	60	114,205,857	100	104,430,321	100	460,000,000	100	529,000,000	100	608,350,000	100	699,602,500	
Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	3	184,171,784	3	114,205,857	3	104,430,321	3	460,000,000	3	529,000,000	3	608,350,000	3	699,602,500	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																	
1. Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	4	9,598,078,785	80	723,875,500	81	4,623,051,356	82	7,876,786,334	83	9,088,214,407	84	10,417,690,573	85	12,169,126,027	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2. Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	2. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%			80		81		82		83		84		85		
3. Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%			80		81		82		83		84		85		
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia																	
Terarahnya Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai Rata-rata Persentase Ketercapaian pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	5	2,127,924,134	82	2,039,844,671	83	1,436,341,744	84	2,538,778,314	85	2,919,505,185	86	3,433,674,965	87	3,946,508,080	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	349,795,821	3	211,204,516	2	300,580,013	2	281,278,314	2	263,687,500	3	365,881,215	3	461,045,267	
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	3	29,616,000	3	48,839,218	2	62,499,985	2	201,250,000	2	231,437,500	3	266,153,125	3	306,076,094	

BAB V

PENUTUP

Demikian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah selama lima tahun ke depan, terhitung mulai tahun 2025-2030 sebagai implementasi kewenangan unsur penunjang, sekaligus menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah sesuai tahun rencana.

Demikian, untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai ketentuan.



LAMPIRAN

Tabel Lampiran Rumus Hitung Indikator Utama dan Indikator Kinerja Kunci Renstra
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2030

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						RUMUS HITUNG	KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	TUJUAN Bapperida										
	Terwujudnya perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi yang berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	Predikat	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Nilai IPPD = Komponen Sinergi (32 Poin) Komponen Kualitas Perencanaan (58 Poin) Komponen Keterhubungan Perencanaan Kinerja (10 Poin) Rentang Nilai: 91-100= Sangat Baik 81-90= Baik 71-80= Cukup Baik 61-70= Kurang <60= Sangat Kurang "Nilai IPPD dan Inovasi Daerah = A + B 1= Tidak Baik 2 = Kurang Baik 3 = Cukup 4 = Baik 5 = Sangat Baik A : Ketercapaian Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan B : Inovasi Daerah"	
		Indeks Riset dan Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Nilai Indeks Riset dan Inovasi Daerah = Indeks Kualitas Kebijakan(40%) ditambah Indeks Inovasi Daerah(60%) dibagi dua Sangat Baik = 70.1-100 Baik = 60.1-70 Cukup = 50.1-60 Kurang = <50	
	SASARAN Bapperida										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						RUMUS HITUNG	KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Poin	88	89	90	91	92	93	Nilai IPPD = Nilai Rata-rata, Nilai Keselarasan RPJMD terhadap RENSTRA, Nilai Keselarasan RPJMD terhadap RKPD, dan Keselarasan RKPD terhadap RENJA Komponen Kualitas Perencanaan (58 Poin) a. Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program/kegiatan/Proyek (49 Poin (84.48%) b. Inovasi Perencanaan Pembangunan (9 Poin (15.52)	
2	Hasil Riset dan Inovasi yang implementatif	Persentase hasil riset dan inovasi yang menjadi dasar Kebijakan Daerah	%	53.85	64.86	72.22	73.68	78.57	78.57	Jumlah Kebijakan yang dihasilkan berdasarkan hasil Riset dan Inovasi daerah pada tahun berkenaan dibagi jumlah Hasil riset dan Inovasi daerah yang dihasilkan lingkup Perangkat Daerah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	Nilai dari 4 komponen SAKIP: 1. Perencanaan Kinerja 2. pengukuran kinerja 3. pelaporan kinerja 4. evaluasi akuntabilitas kinerja internal	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas	%	-	100	100	100	100	100	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas X 100% / Total Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	8	8	8	8	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

LAMPIRAN

Tabel Lampiran Rumus Hitung Indikator Utama dan Indikator Kinerja Kunci Renstra
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2030

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	RUMUS HITUNG	KETERANGAN
1	TUJUAN Bappedalitbang										
	Terwujudnya perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi yang berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	Predikat	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Nilai IPPD = Komponen Sinergi (32 Poin) Komponen Kualitas Perencanaan (58 Poin) Komponen Keterhubungan Perencanaan Kinerja (10 Poin) Rentang Nilai: 91-100= Sangat Baik 81-90= Baik 71-80= Cukup Baik 61-70= Kurang <60= Sangat Kurang "Nilai IPPD dan Inovasi Daerah = A + B 1= Tidak Baik 2 = Kurang Baik 3 = Cukup 4 = Baik 5 = Sangat Baik A : Ketercapaian Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan B : Inovasi Daerah"	
		Indeks Riset dan Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Nilai Indeks Riset dan Inovasi Daerah = Indeks Kualitas Kebijakan(40%) ditambah Indeks Inovasi Daerah(60%) dibagi dua Sangat Baik = 70.1-100 Baik = 60.1-70 Cukup = 50.1-60 Kurang = <50	
	SASARAN Bappedalitbang										
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	%	$72.48+15.52=88$	$73.48+15.52=89$	$74.48+15.52=90$	$75.48+15.52=91$	$76.48+15.52=92$	$77.48+15.52=93$	Nilai IPPD = Nilai Rata-rata, Nilai Keselarasan RPJMD terhadap RENSTRA, Nilai Keselarasan RPJMD terhadap RKPD, dan Keselarasan RKPD terhadap RENJA Komponen Kualitas Perencanaan (58 Poin) a. Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program/kegiatan/Proyek (49 Poin (84.48%)) b. Inovasi Perencanaan Pembangunan (9 Poin (15.52))	
2	Hasil Riset dan Inovasi yang implementatif	Persentase hasil riset dan inovasi yang	%	$28/52*100=53.85$	$24/37*100=64.86$	$13/18*100=72.22$	$14/19*100=73.68$	$11/14*100=78.57$	$11/14*100=78.57$	Jumlah Kebijakan yang dihasilkan berdasarkan hasil Riset dan Inovasi daerah pada tahun	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN							RUMUS HITUNG	KETERANGAN
		menjadi dasar Kebijakan Daerah								berkenaan dibagi jumlah Hasil riset dan Inovasi daerah yang dihasilkan lingkup Perangkat Daerah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	Nilai dari 4 komponen SAKIP: 1. Perencanaan Kinerja 2. pengukuran kinerja 3. pelaporan kinerja 4. evaluasi akuntabilitas kienrja internal	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Bappedalitbang	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	Jumlah Nilai dari komponen SAKIP: Perencanaan (30 Poin) Pengukuran (30 Poin) Pelaporan (15 Poin) Evaluasi Internal (25 Poin)	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	8	8	8	8	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	Tersedianya Dokumen DPA- -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Laporan	5	5	5	5	5	5	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN							RUMUS HITUNG	KETERANGAN
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	5	5	5	5	5	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Tersedianya Laporan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Laporan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	Laporan	1	1	1	1	1	1	Jumlah Laporan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan PD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang sesuai ketentuan	%	12/12*100	12/12*100	12/12*100	12/12*100	12/12*100	12/12*100	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu dibagi jumlah dokumen keuangan yang disusun dikali 100%	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	14	14	14	14	14	14	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	12	12	12	12	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	1	1	1	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	18	18	18	18	18	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
	Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Aset yang tercatat sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah	%	2/2*100	2/2*100	2/2*100	2/2*100	2/2*100	2/2*100	Jumlah Aset yang tercatat sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN							RUMUS HITUNG	KETERANGAN
	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	2	2	2	2	2	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
	Tersedianya Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	4	4	4	4	4	4	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Tersedianya Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	2	2	2	2	2	2	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah yang berkualitas	%	8/8*100	8/8*100	8/8*100	8/8*100	8/8*100	8/8*100	jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah dikali 100%	
	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1160	1160	1160	1160	1160	1160	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	3	3	3	3	3	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	12	12	12	12	12	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	12	12	12	12	12	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	4	4	4	4	4	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	9	9	9	9	9	9	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	135	135	135	135	135	135	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	26	26	26	26	26	26	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN							RUMUS HITUNG	KETERANGAN
		Perundang-Undangan									
	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
	Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Tingkat pemenuhan sarana operasional perangkat daerah sesuai kebutuhan	%	8/8*100	8/8*100	8/8*100	8/8*100	8/8*100	8/8*100	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan administrasi umum perangkat daerah dikali 100%	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	4	4	4	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	2	2	2	2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2	2	2	2	2	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	4	4	4	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	4	4	4	4	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	12	12	12	12	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12	12	12	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	4	4	4	4	4	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
	Meningkatnya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Pengelolaan barang milik daerah unsur penunjang perangkat daerah	%	6/6*100	6/6*100	6/6*100	6/6*100	6/6*100	6/6*100	jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah dikali 100%	
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas	Unit	1	1	1	1	1	1	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN							RUMUS HITUNG	KETERANGAN
		atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan									
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	7	7	7	7	7	7	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	1	1	1	1	1	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	1	1	1	1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	10	10	10	10	10	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5	5	5	5	5	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	meningkatnya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai ketentuan	%	4/4*100	4/4*100	4/4*100	4/4*100	4/4*100	4/4*100	jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah dikali 100%	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	12	12	12	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1	1	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN							RUMUS HITUNG	KETERANGAN
	Berfungsinya barang milik daerah dengan baik	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	%	5/5*100	5/5*100	5/5*100	5/5*100	5/5*100	5/5*100	jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi di bagi jumlah kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dikali 100%	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	20	20	20	20	20	20	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
	Tersedianya pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-		
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	121	121	121	121	121	121	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	1	1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	70	70	70	70	70	70	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	2	2	2	2	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH										
	Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai rata-rata dari Persentase Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD dan Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	72/72*100	75/75*100	75/75*100	75/75*100	75/75*100	75/75*100	Cara Pengukuran : Nilai rata-rata A+B A. Keselarasan Program pada RKPD dibagi Program pada RPJMD dikali 100% B. Keselarasan Program pada RENSTRA PD dibagi Program pada RPJMD dikali 100%	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan										
	Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Daerah yang sesuai dengan	%	3/3*100	2/2*100	2/2*100	2/2*100	3/3*100	3/3*100	Nilai Rata-rata Persentase realisasi Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN							RUMUS HITUNG	KETERANGAN
	Daerah dengan Ketentuan yang berlaku	ketentuan yang berlaku									
	Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	3	2	2	2	3	3	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	
	Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	
	Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	1	1	1	1	1	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	
	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	1	1	1	1	1	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	1	1	1	1	1	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	
	Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	40	40	40	40	40	40	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	
	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	3	2	2	2	3	3	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah										
	Terpenuhinya Kualitas Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai ketentuan	%	72/72*100	75.33/93*100	76.26/93*100	77.19/93*100	78.12/93*100	79.05/93*100	Jumlah analisis data dan informasi pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan di bagi jumlah seluruh analisis data dan informasi pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah di kali 100%	
	Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua	Dokumen	2	2	2	2	2	2	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN							RUMUS HITUNG	KETERANGAN
		Perencanaan Pembangunan Daerah)									
	Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	511	511	511	511	511	511	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah										
	Meningkatnya Ketercapaian Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	Tingkat Ketercapaian IKU Perangkat Daerah dan IKU Pemerintah Daerah	%	74,4/93*100	75.33/93*100	76.26/93*100	77.19/93*100	78.12/93*100	79.05/93*100	Jumlah ketercapaian IKU perangkat daerah dan IKU Pemerintah Daerah yang dihasilkan di bagi jumlah seluruh ketercapaian IKU dikali 100%	
	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	2	2	2	2	2	2	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	
	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	2	2	2	2	2	2	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah										
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemanfaatan Pengelolaan Data Pada SIPD	%	72/72*100	75/75*100	75/75*100	75/75*100	75/75*100	75/75*100	Jumlah data Implementasi sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dihasilkan dibagi jumlah seluruh data implementasi sistem informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah di kali 100%	
	Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	3	3	3	3	3	3	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	46,4*100/58	46,98*100/58	47,56*100/58	48,14*100/58	48,72*100/58	49,3*100/58	Keselarasn Program dan indikator pada RENJA dibagi Program pada RKPD dikali 100%	
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	%	46,4*100/58	46,98*100/58	47,56*100/58	48,14*100/58	48,72*100/58	49,3*100/58	Keselarasn Program dan indikator pada RENJA dibagi Program pada RKPD dikali 100%	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN							RUMUS HITUNG	KETERANGAN
	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam									
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	46,4*100/58	46,98*100/58	47,56*100/58	48,14*100/58	48,72*100/58	49,3*100/58	Keselarasan Program dan indikator pada RENJA dibagi Program pada RKPD dikali 100%	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia										
	Terarahnya Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai Rata-rata Persentase Ketercapaian pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	47,56*100/58	48,14*100/58	48,72*100/58	49,3*100/58	49,88*100/58	50,46*100/58	Nilai Rata-rata Persentase realisasi Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	2	2	2	3	3	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	3	2	2	2	3	3	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	5	5	5	5	5	5	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada	Laporan	3	3	3	3	3	3	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN							RUMUS HITUNG	KETERANGAN
		Bidang Pemerintahan									
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	2	2	2	3	3	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	3	3	3	3	3	3	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	5	5	5	5	5	5	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	3	3	3	3	3	3	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)										
	Terarahnya Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Nilai Rata-rata Persentase Ketercapaian pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	$47,56 \times 100 / 58$	$48,14 \times 100 / 58$	$48,72 \times 100 / 58$	$49,3 \times 100 / 58$	$49,88 \times 100 / 58$	$50,46 \times 100 / 58$	Nilai Rata-rata Persentase realisasi Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN							RUMUS HITUNG	KETERANGAN
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	2	2	2	3	3	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	3	2	2	2	3	3	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	5	5	5	5	5	5	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	3	3	3	3	3	3	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	2	2	2	3	3	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	3	3	3	3	3	3	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan	Laporan	5	5	5	5	5	5	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN							RUMUS HITUNG	KETERANGAN
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA									
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	3	3	3	3	3	3	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan										
	Terarahnya Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai Rata-rata Persentase Ketercapaian pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	$47,56 \times 100 / 58$	$48,14 \times 100 / 58$	$48,72 \times 100 / 58$	$49,3 \times 100 / 58$	$49,88 \times 100 / 58$	$50,46 \times 100 / 58$	Nilai Rata-rata Persentase realisasi Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	2	2	2	3	3	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	3	2	2	2	3	3	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	5	5	5	5	5	5	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan	Laporan	3	3	3	3	3	3	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN							RUMUS HITUNG	KETERANGAN
		RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur									
	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	2	2	2	3	3	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	3	3	3	3	3	3	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	5	5	5	5	5	5	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	3	3	3	3	3	3	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH										
	Hasil Riset dan Inovasi yang direkomendasikan menjadi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi yang dihasilkan	Rekomendasi	7	7	7	7	7	7	Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis riset dan inovasi yang dihasilkan dibagi seluruh rekomendasi dikali 100%	
	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan										
	Terpenuhinya bahan kebijakan perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	Persentase bahan kebijakan perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	%	7/7*100	7/7*100	7/7*100	7/7*100	7/7*100	7/7*100	Jumlah bahan kebijakan perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan dibagi Jumlah Riset yang ditargetkan dikali 100%	
	Terpenuhinya hasil evaluasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan,	Persentase Karya tulis ilmiah terindeks global lainnya yang terpublish	%	7/7*100	7/7*100	7/7*100	7/7*100	7/7*100	7/7*100	Jumlah karya tulis ilmiah yang dihasilkan dibagi jumlah karya tulis ilmiah yang ditargetkan dikali 100%	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN							RUMUS HITUNG	KETERANGAN
	pengkajian dan penerapan yang memenuhi standar	Persentase karya tulis ilmiah terindeks global yang terdaftar	%	7/7*100	7/7*100	7/7*100	7/7*100	7/7*100	7/7*100	Jumlah karya tulis ilmiah yang dihasilkan dibagi jumlah karya tulis ilmiah yang ditargetkan dikali 100%	
	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	Laporan pementauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	Laporan	-	-	1	1	1	1	Jumlah Laporan pementauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	
	Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Naskah	9	7	7	7	7	7	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	
	Terlaksananya fasilitas dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	Laporan	-	-	1	1	1	1	Jumlah laporan fasilitasi dan poembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	
	Terselenggaranya rapat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	Laporan	-	-	1	1	1	1	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	
	Terlaksananya bimbingan teknis dan supervise di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervise di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan kerja sama Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	Pelatihan	-	-	1	1	1	1	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervise di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan kerja sama Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	
	Terlaksananya koordinasi sitem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Dokumen	-	-	1	1	1	1	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	
	Invensi dan Inovasi										

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN							RUMUS HITUNG	KETERANGAN
	Meningkatnya Inovasi dan Inovasi Perangkat Daerah yang bermanfaat	Nilai Predikat Inovasi dan Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Skor Inovasi Daerah = Skor Satuan Pemerintah daerah + Skor satuan Inovasi Daerah	
	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Laporan	1	1	1	1	1	1	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	
	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Laporan	1	1	1	1	1	1	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	
	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	Laporan	1	1	1	1	1	1	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	
	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Laporan	1	1	1	1	1	1	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	
	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/orga nisasi penelitian lainnya di daerah	Laporan	1	1	1	1	1	1	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	
	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi	Laporan	1	1	1	1	1	1	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN							RUMUS HITUNG	KETERANGAN
		kepada pelaku inovasi.									
	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Laporan	1	1	1	1	1	1	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	